



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2024 terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Parepare tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
20. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal.....

Pasal 5A

- (1) Perubahan RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan dan Perubahan RAPBD Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kota Parepare dan hasil evaluasi triwulan II APBD 2024.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dokumen perubahan RKPD, secara sistematis memuat kerangka penjabaran yang terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Penutup
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 10

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Perubahan RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan dan Perubahan RAPBD Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kota Parepare dan hasil evaluasi triwulan II APBD 2024.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dokumen perubahan RKPD, secara sistematis memuat kerangka penjabaran yang terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Penutup.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA



Pemerintah Kota Parepare



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-13
BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 TRIWULAN II	
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	II-1
2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro.....	II-1
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	II-2
2.1.1.3 Ketenagakerjaan	II-2
2.1.1.4 Kemiskinan.....	II-3
2.1.1.5 Gini Ratio	II-4
2.1.1.6 Pendapatan per Kapita	II-4
2.1.1.7 Inflasi	II-5
2.1.2. Evaluasi Hasil Capaian Indikator Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024.....	II-5
2.1.2.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Parepare Tahun 2023.....	II-37
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.....	II-50
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024	II-50
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024.....	II-53
2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Pelaksanaan RKPD 2024.....	II-64
2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II	II-64
2.3.2 Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke I	II-64
2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024 Triwulan selanjutnya	II-64
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro.....	III-1



3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.1.2. Inflasi.....	III-10
3.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III-13
3.1.1.4. Tingkat Kemiskinan	III-15
3.1.1.5. Rasio Gini.....	III-17
3.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-18
3.1.1.7. Tantangan Perekonomian Daerah	III-19
3.1.1.8. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-20
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-21
3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
3.2.1.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah.....	III-23
3.2.1.2. Perubahan Pendapatan Asli Daerah	III-23
3.2.1.3. Perubahan Pendapatan Transfer	III-24
3.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-24
3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	III-27
3.2.2.1. Belanja Operasi	III-27
3.2.2.2. Belanja Pegawai	III-27
3.2.2.3. Belanja Barang dan Jasa	III-28
3.2.2.4. Belanja Bunga.....	III-28
3.2.2.5. Belanja Subsidi	III-28
3.2.2.6. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.....	III-28
3.2.2.7. Belanja Modal	III-29
3.2.2.8. Belanja Tidak Terduga	III-30
3.2.2.9. Belanja Transfer	III-30
3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
3.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan.....	III-33
3.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	III-33
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-8
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-9
4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-9
4.2.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-10
4.2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	IV-11
4.2.1.4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-13
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	
Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	IV-19
4.2.2.1. Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-19
4.2.2.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-20
4.2.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-30
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024	IV-76
4.2.3.1. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-76
4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-77
4.2.3.3. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV-79



4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	
4.2.4.1 Strategi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024	
4.2.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024	
4.2.4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-92
4.3 Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2025	IV-95
4.3.1 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Dengan Sasaran RPD	IV-96
4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024	IV-97
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Parepare	IV-121
BAB V. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024	V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024	V-3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024	V-40
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
6.1 Indikator Makro Pembangunan	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal	VI-26
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's)	VI-31
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2 Kesimpulan	VII-2



DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Parepare Tahun 2019–2023	II-11
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018 – 2023 Periode Pelaksanaan Tahun 2023	II-42
Tabel 2.3	Kriteria Penilaian Capaian Realisasi Pendanaan dan Kinerja	II-50
Tabel 2.4	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024	II-51
Tabel 2.5	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	II-53
Tabel 2.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024	II-57
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelaksanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024	II-62
Tabel 3.1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III-4
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-5
Tabel 3.3	Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2024 (Persen)	III-6
Tabel 3.4	Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024 (triliun rupiah)	III-8
Tabel 3.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)	III-9
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-10
Tabel 3.7	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024	III-11
Tabel 3.8	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024	III-12
Tabel 3.9	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022–Februari 2024	III-13



Tabel 3.10	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023	III-14
Tabel 3.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022- Maret 2024	III-15
Tabel 3.12	Perbandingan Angka Kemiskinan Parepare dan Sulawesi Selatan, Maret 2023	III-16
Tabel 3.13	Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Kota Parepare Tahun 2024	III-18
Tabel 3.14	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024	III-23
Tabel 3.15	Target Perubahan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2024	III-30
Tabel 3.16	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2024	III-32
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024 – 2026	IV-4
Tabel 4.2	Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024	IV-5
Tabel 4.3	Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024	IV-7
Tabel 4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-21
Tabel 4.5	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-23
Tabel 4.6	Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.7	Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-47
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan arah Kebijakan RPD Tahun 2024	IV-65
Tabel 4.9	Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-67
Tabel 4.10	Tema RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD Kota Parepare Tahun 2024	IV-77
Tabel 4.11	Prioritas Pembangunan Kota Parepare dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024	IV-78
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-80
Tabel 4.13	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-84
Tabel 4.14	Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-89
Tabel 4.15	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-91



Tabel 4.16	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-92
Tabel 4.17	Keselaran Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Dengan Sasaran RPD Untuk Tahun 2024	IV-96
Tabel 4.18	Keselaran Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-99
Tabel 4.19	dukungan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024	IV-102
Tabel 4.20	Kesesuaian Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2024	IV-122
Tabel 5.1	Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Parepar	V-5
Tabel 5.3	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024	V-41
Tabel 6.1	Capaian Indikator Makro Tahun 2023 dan Target Indikator Kota Parepare Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Parepare Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.3	Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 dan Target Indikator Kinerja Kunci Kota Parepare Tahun 2024	VI-4
Tabel 6.4	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dan Target Standar Pelayanan Minimal Kota Parepare Tahun 2024	VI-27
Tabel 6.5	Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022-2023 dan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Parepare Tahun 2024	VI-32



DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1	Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-12
Gambar 3.1	Pertumbuhan Dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024	IV-10
Gambar 4.2	Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024	IV-11
Gambar 4.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	IV-12
Gambar 4.4	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	IV-14
Gambar 4.5	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi	IV-17



DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023	II - 1
Grafik 2.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023	II - 2
Grafik 2.3	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	II - 3
Grafik 2.4	Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023	II - 3
Grafik 2.5	Perbandingan Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023	II - 4
Grafik 2.6	Perbandingan Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023	II - 5
Grafik 2.7	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II - 6



Pemerintah Kota Parepare

BAB I

PENDAHULUAN





LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
PAREPARE NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Parepare telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 27 Tahun 2023. Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Parepare Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Parepare perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini yang dihadapi pemerintah daerah, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, adanya perkembangan regulasi yang menyebabkan adanya pemutakhiran subkegiatan seperti PMKRI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian DBHCT.

Secara umum, Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD pokok Kota Parepare Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 345 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :



- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kota Parepare, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
 48. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor);
 49. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 6);



50. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
51. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);
52. Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 memiliki hubungan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni: dokumen Perubahan RKPD disusun sebagai penjabaran tahun pertama RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Dokumen Perubahan RKPD juga merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Perubahan Renja SKPD.

Hubungan Perubahan RKPD Kota Parepare tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya yakni:

- a. Perubahan RKPD Kota Parepare tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP tahun 2024 juga memyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b. Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dan dokumen RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026.
- c. Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

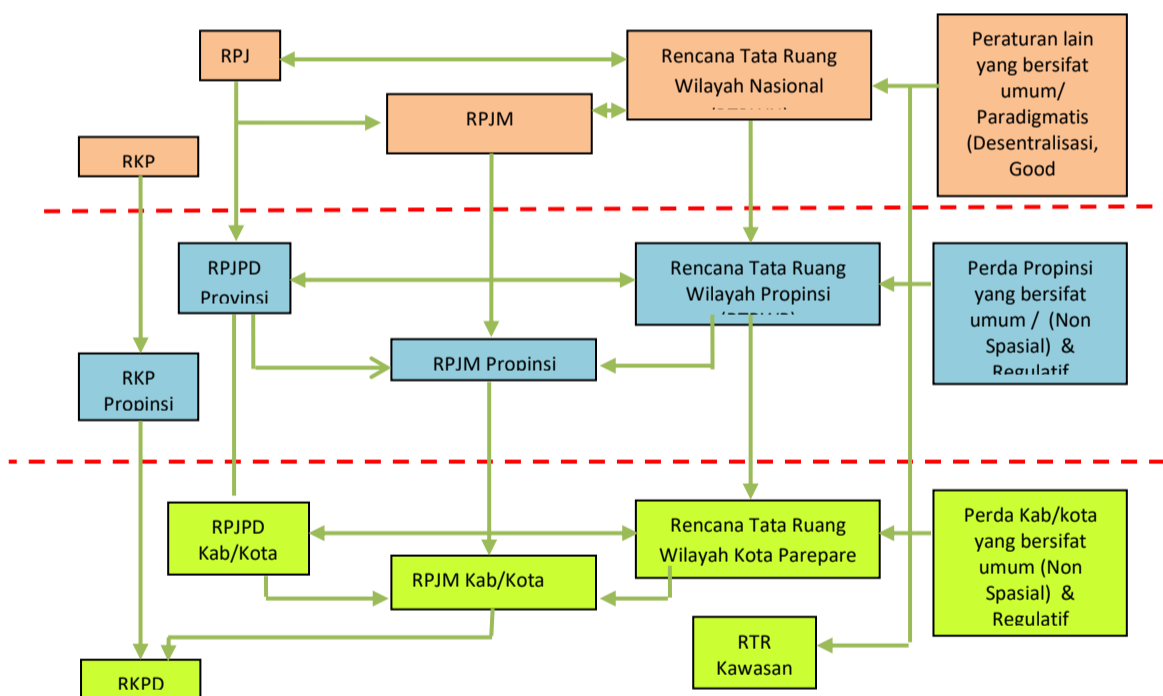


adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Disamping itu, perumusan arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD harus memperhatikan arahan pembangunan dan program strategis nasional yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Hubungan antara Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara lebih jelas pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

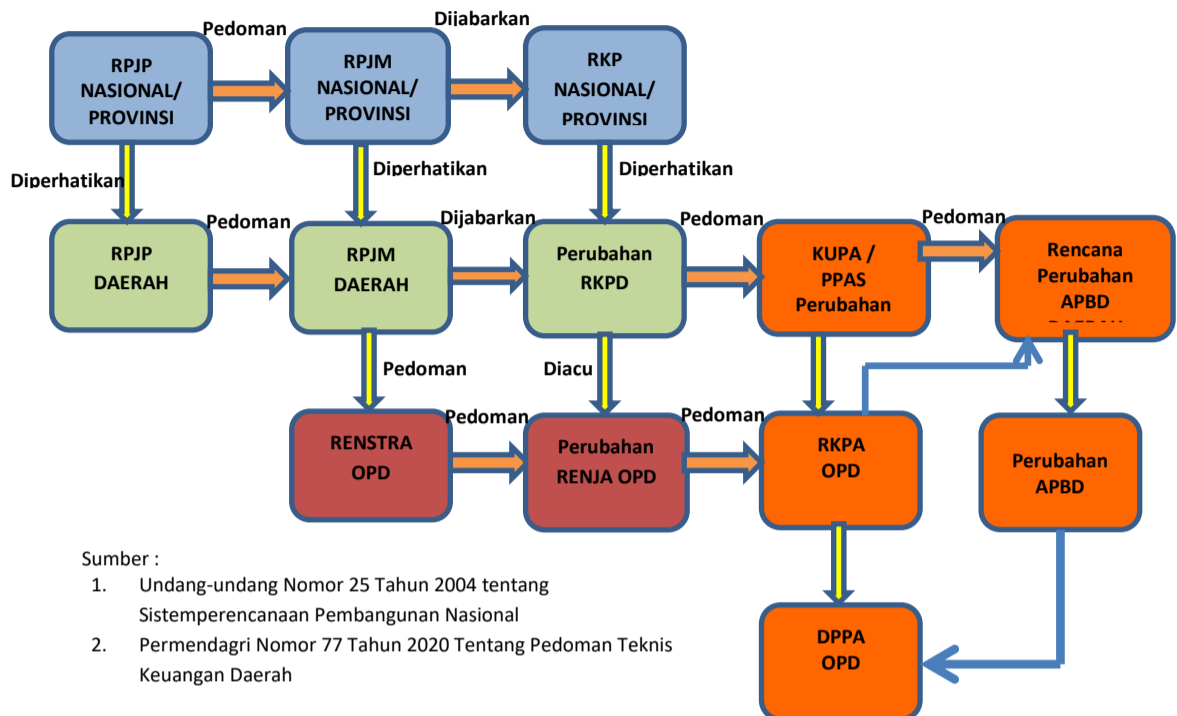


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Demikian pula hubungan antara dokumen Perubahan RKPD sangat erat dengan dokumen penganggaran daerah, dimana Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Kota Parepare Tahun 2024. Secara jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Perubahan RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun berkenaan. Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD tahun berkenaan Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, perubahan



terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD tahun berkenaan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah Pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan Pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan ke-2.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 adalah untuk menghasilkan suatu dokumen perubahan rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-PAPBD) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen perubahan RKPD.



Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenan; Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, evaluasi pelaksanaan RPJMD, dan memperhatikan RKPD tahun berjalan

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah. Pada sub bab Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Parepare. Pada sub bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024. Terdapat sub bab terkait Tujuan dan Sasaran Pembangunan, sub bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024, sub bab Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan sub bab Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VII Penutup; Memuat tentang catatan penting dalam penyusunan RKPD, tindak lanjut, dan kaidah pelaksanaan RKPD Kota Parepare Tahun 2024.



Pemerintah Kota Parepare

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 TRIWULAN II





BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan, Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Parepare. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Data capaian indikator makro untuk Kota Parepare hingga semester ke-II sebagai berikut:

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2022 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.1

PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PAREPARE, PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN NASIONAL TAHUN 2023



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024



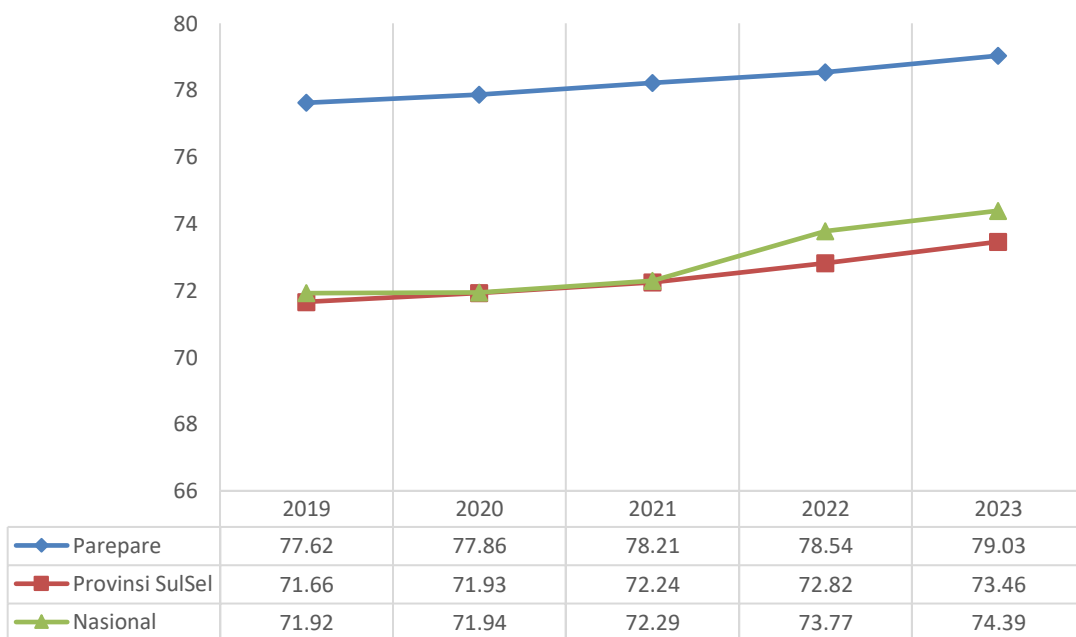
Laju pertumbuhan ekonomi ditingkat Nasional, Regional dan Kota Parepare mengalami pertumbuhan yang menurun diperiode waktu tahun 2023. Untuk capaian kinerja tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Parepare – SulSel - Nasional mengalami penurunan menjadi 3,88 – 4.51 – 5.05.

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kondisi pembangunan yang berkualitas, menggambarkan kondisi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mengalami peningkatan secara paralel dengan Nasional, Regional dan Kota Parepare hingga tahun 2023.

Pencapaian IPM Kota Parepare di tahun 2023 masih lebih tinggi dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka 79,03. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Sulawesi Selatan tercatat pada angka 73,46 dan nasional sebesar 74,39. Perbandingan capaian IPM antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023



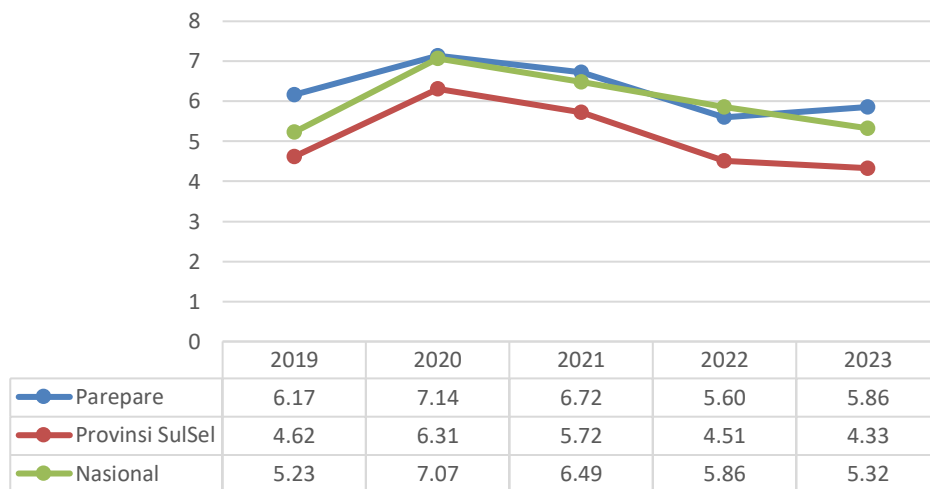
Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.3 Ketenagakerjaan



Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Di tahun 2023, TPT Parepare lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 4,51. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

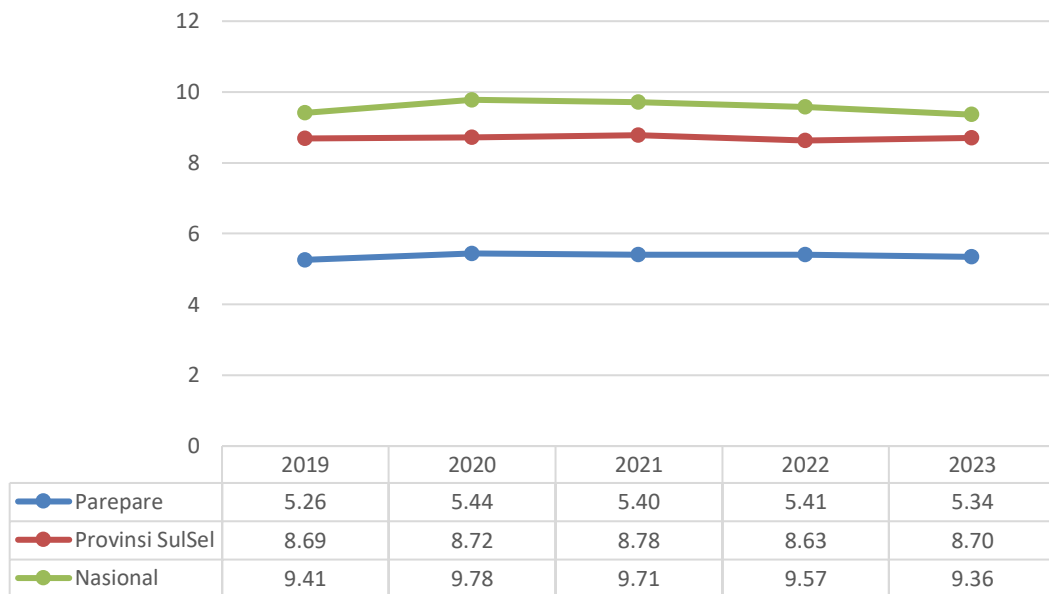
2.1.1.4 Kemiskinan

Di tahun 2023 angka kemiskinan Kota Parepare menunjukkan angka 5,34. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase penduduk miskin di Kota Parepare relatif lebih rendah dari keduanya. Untuk tahun 2023 perbandingan kondisi kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara berturut-turut menunjukkan angka 5,34 persen, 8,70 persen, dan 9,36 persen.

Grafik 2.4
Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota



Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.5 Gini Ratio

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Indeks Gini Kota Parepare di tahun 2023 terlihat pada angka 0.381.

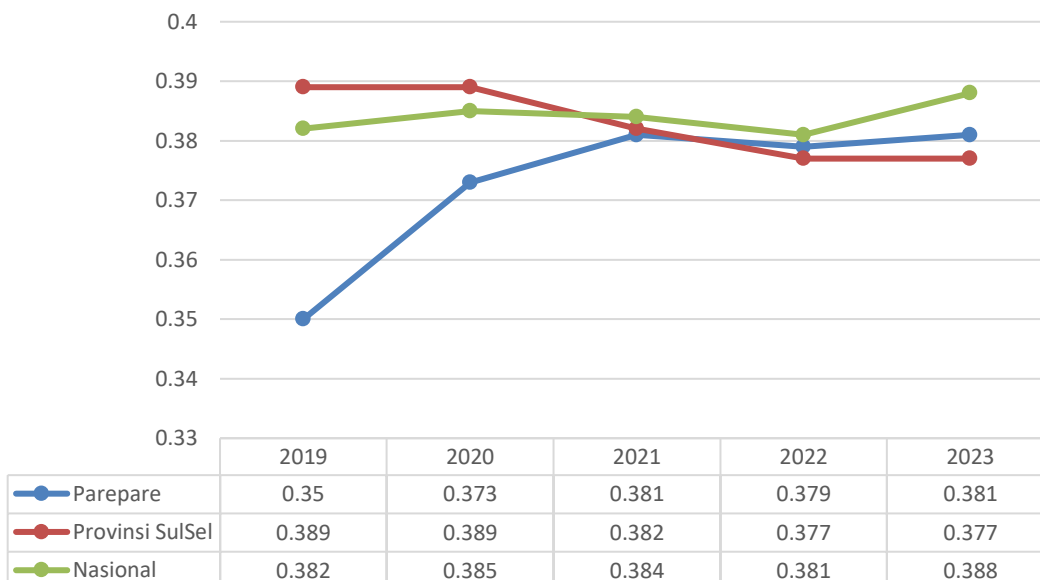
Indeks Gini Kota Parepare tahun 2023 dibanding Indeks Gini Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5

Perbandingan Indeks Gini Kota Parepare,



Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

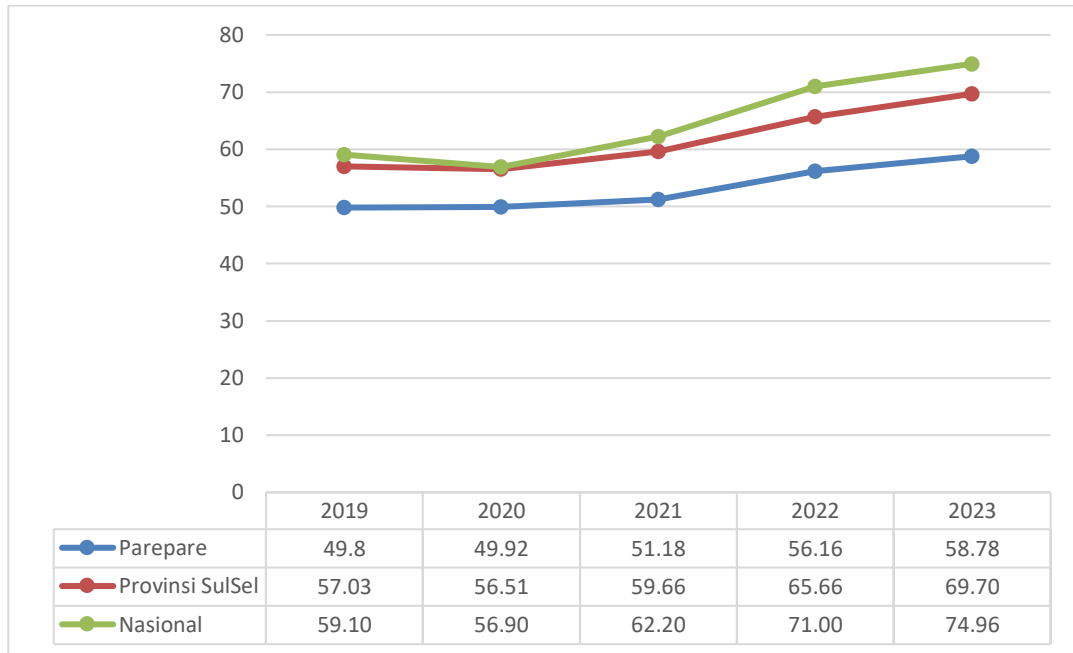
2.1.1.6 Pendapatan per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional. Melihat tren pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kota Parepare secara berkala terus meningkat di tiap tahunnya. Hingga tahun 2023 mencapai angka Rp. 58,78 juta. Begitu pula PDRB Sulawesi Selatan dan PDB Nasional yang juga mengalami peningkatan. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.6
Perbandingan Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023



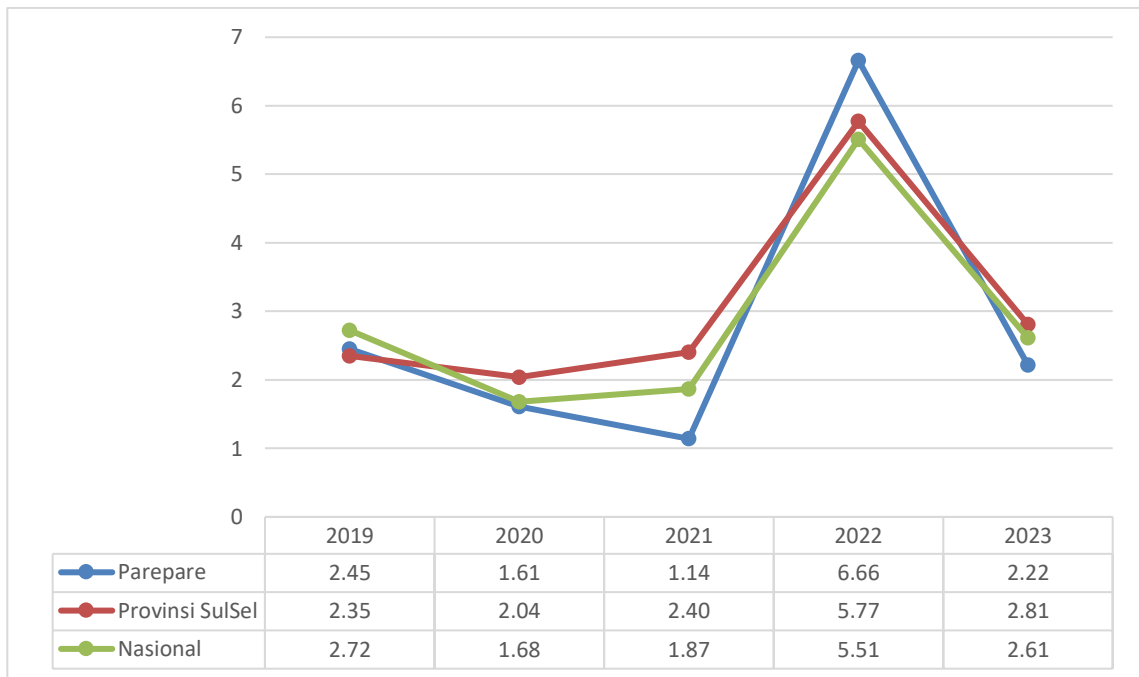
Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.7 Inflasi

Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Untuk perbandingan tingkat inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 2.7 Perbandingan Tingkat Inflasi
Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2024



Tahun 2023, inflasi Kota Parepare mencapai angka 2,22%, saat yang sama inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional juga mencatat inflasi yaitu masing-masing 2,81% dan 2,61%. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen yang meningkat signifikan pada tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok Kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok Pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

2.1.2 Evaluasi Hasil Capaian Indikator Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan:

- a. Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Hasil capaian indikator kinerja kunci bertujuan untuk memberikan gambaran *impact dan outcome* pencapaian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Parepare hingga tahun 2023 dan dijabarkan dalam 2 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum yang terdiri dari



urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Parepare Tahun 2019–2023

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,65	-0,08	4,41	5,93	3,88
2	Laju Inflasi	%	2,45	1,61	2,91	6,66	2,22
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Juta Rp	49,80	49,92	51,18	56,16	58,08
4	Indeks Gini	Angka	0,350	0,373	0,381	0,379	0,381
7	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	%	94,74	94,56	94,60	94,59	94,66
	Persentase Penduduk Miskin	%	5,26	5,44	5,40	5,41	5,34
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	77,62	77,86	78,21	78,54	79,03
11	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka	97,97	97,67	97,75	98,42	n/a
	<i>Harapan Lama Sekolah</i>	<i>Tahun</i>	14,49	14,50	14,51	14,52	14,54
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,30	10,45	10,65	10,66	10,70
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,28	71,31	71,57	71,78
	<i>Paritas Daya Beli</i>	<i>Juta Rp</i>	13,65	13,67	13,79	14,03	14,49
14	Persentase balita gizi buruk	%	1,00	0,33	0,10	0,12	0,098
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,86	1,31	1,94	4,93	4,71
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	62,80	63,40	66,94	63,62	65,52
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	6,17	7,14	6,72	5,60	5,86
20	Rasio Penduduk yang Bekerja	Angka	93,65	92,86	93,28	94,40	94,14
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77,30	77,00	76,75	79,76	79,76

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	14,27	16,27	16,69	16,66	21,95
27	Opini BPK	Hasil Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,00	90,00	90,00	88,5	89
29	Penguatan Cadangan Pangan	Angka	40,00	-	100	100	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	1.186.848	1.361.000	1.622.137	1.302.669	1.555.706
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	52,29	55,98	55,08	54,67	57,91
3	Produktivitas total daerah	Angka	0,105	0,1	0,104	0,12	0,12
9	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	41,01	32,35	34,20	34,17	38,61
	Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
	- pajak daerah		9	9	9	9	9
	- retribusi umum		9	9	9	9	9
	-retribusi jasa usaha		6	6	6	6	6
	- retribusi perizinan tertentu		6	6	2	2	2
10	Rasio ketergantungan	Angka	49,05	46,18	114	44,91	46,26
ASPEK PELAYANAN UMUM							
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
I	PENDIDIKAN						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	52,14	41,97	36,66	42,01	41,57
1.2	Angka Partisipasi Kasar						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		107,33	106,92	92,77	94,48	81,36
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B		79,68	81,32	96,70	87,96	91,36

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C		90,86	92,07	114,99	115,25	121,35
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	1,75	2,00	2,00	1,00	0,63
1.4	Angka Partisipasi Murni						
1.4.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,66	99,38	82,70	93,45	81,36
1.4.2	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,60	62,73	65,74	87,33	59,05
1.4.3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/ SMK/MA/Paket C	%	62,35	63,47	85,50	121,17	91,33
1.5	Angka Partisipasi Sekolah						
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	822,31	801,09	927,72	934,51	813,61
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	785,97	627,28	967,07	873,36	590,47
1.5.3	Angka Partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	1.267,59	1.074,67	1149,93	1211,73	913,34
1.6	Angka Putus Sekolah :						
1.6.1	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,07	0,12	0,12	0,01
1.6.2	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,16	0,24	0,29	0,04	0,3
1.6.3	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA	%	0,21	0,18	0,23	0,09	0,75
1.7	Angka Kelulusan :						
1.7.1	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	94,57	96,87	71,31
1.7.2	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	97,02	93,70	84,70
1.7.3	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	109,70	107,98	97,22
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :						
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	108,46	105,89	97,53	96,70	146,63
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,78	90,86	126,99	125,93	82,71
1.9	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	%	65,13	91,26	92,38	93,50	98,08
1.9.1	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	%	62,53	99,44	90,63	91,29	93,94

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.9.2	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikandasar	%	51,94	53,34	53,71	51,51	52,93
1.10	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	Angka	48,37	31,58	27,62	37,92	27,97
1.12	Rasio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	Angka	613,94	854,15	518,25	809,22	782,47
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Angka	793,94	1178,52	594,92	894,93	966,27
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar	Angka	61,39	82,22	44,50	45,25	40,06
1.6.3	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA	%	0,21	0,18	0,23	0,09	0,75
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	91,62	96,26	86,97	82,05	57,19
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	100	100	100
1.18	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97,53	97,15	97,81	98,17	100
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,49	45,26	95,63	77,79	98,16
II	KESEHATAN						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	1,10	2,11	7,23	9,76	11,61
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Orang	999	995	981	977	972
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,61	1,69	5,33	8,49	10,37
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	146,79	73,39	228,31	23,77	124,43
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	9,06	8,46	8,71	11,02	11,06
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,25	0,29	0,26	0,29	0,29
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0,0009	0,0011	0,0016	0,0045	0,53

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,0067	0,0091	0,0099	0,00102	1,13
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,51	76,60	86,50	87	94,88
2.13	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	90,91	100	100	100
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	110,69	128,48	101,30	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,00	0,00	0,01	0,01	0,016
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	82,67	47,42	44,53	70,42	67,52
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk)	309,96	194,77	183,46	290,09	322,5
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	12,39	9,90	6,44	3,65	4,06
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	82,67	47,42	44,53	87	67,52
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	87,63	28,47	90,17	87	82,79
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	31,64	100	100	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria	Kasus	9,44	13,20	11	10	11,23

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi	%	0,2900	0,2244	0,20	0,35	0,87
2.31	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	%	74,99	74,55	74,70	75	73
2.32	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	34,90	39,53	42	50	77,78
2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	28	18	100	100	100
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	99,11	100	90	100
2.35	Cakupan puskesmas	%	150	200	200	200	200
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	136,36	136,36	95,45	95,45	100
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	86,63	68,15	76,76	65,8	100
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	94,51	75,44	82,73	69,7	95,00
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	56,20	56,28	100	90	100
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	99,05	59,63	75,74	100	93,86
2.41	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100
2.42	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	99,97	25,50	26,2	100	99
2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100
2.44	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
2.45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	%	100	100	100	100	100

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam						
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Pekerjaan Umum:						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	60,45	62,5	78,65	83,17	74,9
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/Jiwa	2,1	1,75	1,76	1,9	1,97
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	60,45	62,5	78,65	83,17	83,17
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	17,46	18,79	18,79	18,9	18,9
3.1.6	persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	38	38	38	38	38
3.1.7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90	93,35	93,76	88,81	89,4
3.1.8	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	0	0	0	0	0
3.1.9	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	86,46	86,87	87,10	93,86	94,43
3.1.10	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	%	92,5	93	94,25	94,25	95
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	47,9	52,5	80,00	80	81
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	90,46	91,78	94,74	95,07	57,24
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	17,27	26,84	26,84	26,87	22,69
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	87,56	96,87	97,90	97,97	94,25
3.1.15	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	93,50	97,14	98,17	98,22	94,25
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	%	12,65	12,65	12,54	-	-
3.1.17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	13,50	14,50	14,51	-	-
3.1.19	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	1,55	1,60	1,62	-	-

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3.2	Penataan Ruang:						
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	50,7	70,88	74,18	59,66	80
3.2.4	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	%	0	0	0	0	0
3.2.5	Rasio Luas Kawasan Tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0	0	0	0	0
2.3.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	99,97	99,98	99,98	99,86	100
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	Rasio Rumah Layak Huni		0,253	0,220	0,230	0,24	0,23
4.2	Rasio permukiman layak huni		1.024	0,685	0,768	0,768	14,36
4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	97,11	93,89	95,81	96,53	94,13
4.4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	55,01	40,07	85,18	82,70	71,80
4.6	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1,71	3,63	0,02	2,68	2,53
4.7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	11.659	8,91	0,28	4,71	5,65
4.8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	2,82	15,78	7,29	12,72	11,23
4.9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	%	100	100	100	100	100
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Per 10.000 penduduk	2,06	2,01	25,09	31,5	37,9
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	%	92,94	98,20	100	100	100
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	93,87	96,33	99,2	100	100
VI	SOSIAL						
6.1	Persentase PMKS Memperoleh Bantuan Sosial (%)	%	68,88	82,75	85,23	114,33	66,00
6.2	Persentase PMKS yang Tertangani	%	75,59	65,79	63,81	114,33	100
6.3	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	75,59	65,79	63,81	116,63	92,10
6.4	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	11,00	11,00	11,00	-	-
6.5	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100
6.6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	11,00	11,00	11,00	11	8
6.7	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100
6.8	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20,09	31,32	32,1	32,1	31,5
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
I	TENAGA KERJA						
1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	%	16,81	15,18	21	13	11
1.2	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	88,89	88,89	90,91	61,50	0

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	(PB)						
1.3	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	92,15	74,65	83,17	83,35	84,06
1.5	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK	%	89,24	91,36	97,50	97,64	91,5
1.6	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	0
1.9	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	87,53	62,34	78,05	79,82	70,2
1.10	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	89,77	85,71	77,33	79,78	90,9
1.12	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	17,28	7,59	24,52	26,83	-
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	9,29	7,96	18,79	18,79	18,79
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	24	24	24	20	20
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	90,71	78,79	81,21	81,21	81,21
2.4	Rasio KDRT	%	0,13	0,18	0,18	0,045	0,098
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0
2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,7	51,79	54,37	50,12	51,44
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0,97	0,98	0,98	0,98	0,99
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,02	1,03	1.117	1.117	0,968
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,8	1,8	1.267	1.267	0,938
2.17	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi		1,13	1,13	2,05	1,13	1,012
2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 tahun		1	1	1	1	1
2.19	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	%	40,66	40,69	42,54	42,54	45,3
III	PANGAN						
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	266,72	247,82	248,13	253,2	295
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	100	100	100	100
3.3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan	%	100	100	100	100	100
IV	PERTANAHAN						

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		1	1	5	3	3
	Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat	%	0,161	2.340	0,34	0,25	1,32
V	LINGKUNGAN HIDUP						
5.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Ada/TidakAd	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada/TidakAd	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.29	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	95,2	96	96,85	96,4	82,14
5.30	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	95	95	89,85	89	90
5.31	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	51,38	51,38	51,38	63,79	62
5.32	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannyat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
5.33	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
5.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada
3.3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan	%	100	100	100	100	100
5.36	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	%	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada
5.37	Penetapan Hak MHA	%	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
5.38	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	%	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada
5.39	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	%	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada
5.40	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Angka	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan
5.41	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.42	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	100	100	100	100	100
5.43	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	100	97	98	99	99
5.44	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	20	22	24	26	27
5.45	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	86,78	89,00	91	93	93
5.46	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	80,00	75,00	74	73	72
5.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	75,00	75,00	73,00	75	75
5.48	Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100
5.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taatterhadap peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
VI	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,99	0,99	1,00	1,00	1
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,80	0,82	0,81	0,74	0,86
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
6.5	Penerapan KTP Nasional berbais NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah		
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	100	100	100	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	
VII	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki Barat	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Soreang	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ujung	%	100	100	100	100	100
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	0	0	0	0	0
	Kecamatan Bacukiki		0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok
	Kecamatan Bacukiki Barat		0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok
	Kecamatan Soreang		0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok
	Kecamatan Ujung		0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok
7.3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK						
	Kecamatan Bacukiki		26 Kelompok	26 Kelompok	26 Kelompok	26 Kelompok	26 Kelompok
	Kecamatan Bacukiki Barat		7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok
	Kecamatan Soreang		28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok	28 Kelompok
	Kecamatan Ujung		19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	16 Kelompok	16 Kelompok

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
7.6	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki Barat	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Soreang	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ujung	%	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Bacukiki Barat	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Soreang	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ujung	%	100	100	100	100	100
VIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,12	1,55	1,55	1,26	1,26
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,19	2,19	2,19	2,35	2,35
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperanaktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	30,00	30,00	30,00	40,00	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	6,06	6,06	12,00	12,12	12,12
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dankualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	1	
8.6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Jumlah	1	1	1	5	5
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan		30	38	38	38	38

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	kependudukan						
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	2	2	3,52	3	2,79
8.9	Ratio Akseptor KB	%	63,97	66,30	67	62,97	66,62
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Angka	12,356	12,752	13,022	12,185	13,268
8.11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15 19 Tahun (ASFR 15–19)	Angka	17,38	17,38	17,38	20	20
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	%	0,39	0,39	0,39	0,31	176
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64	12,49	10,81	15,41	9,77
8.14	persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	31,44	33,86	35,75	36,08	36,3
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	63,97	50,82	50,82	53,86	66,62
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80,50	62,19	83,36	81,67	100
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	76,50	56,58	84,28	83,80	80,18
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	73	51	73	78,12	67,44
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	0	0	0	0	0
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	1475	950	950	950	990
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	79	57	77	72,44	67,23
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	71	100	100	100	100
8.25	persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	93	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	37,46	100	62,37	54,64	100
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20	20	21	21	22,5
8.31	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,643	0,783	0,56	0,54	0
IX	PERHUBUNGAN						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	3.265.930	2.523.264	610.770	114,652	1.769.401
9.2	Rasio Ijin Trayek	Angka	0,00017	0,0005	0,0001	0	0
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah pengujian	55	180	58	878	350
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan	6 = 3/0/3	6 = 3/0/3	6 = 3/0/3	6	6
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	70,00	65,00	34,00	36	60
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	27	30	47	58	145

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
9.7	Pemasangan Rambu- rambu	%	93	23	43	24	39
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Kenda raan	0,0102	0,0083	0,0775	0,0148	0,092
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Ton	2.823.583	3.592.523	1.383.813	1.995.924	2.764.512
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Ton	2.823.583	3.592.523	1.383.813	1.995.924	2.764.512
X	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	79,08	79,08	79,08	87,15	-
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	88,71	91,94	94,34	91,8	93,48
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	60,12	65,53	78,17	81,06	83,41
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	28,59	16,43	16,46	30,81	-
XI	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	55,91	56,16	56,36	56,56	-
11.2	Persentase UKM non BPR/LMK aktif	Unit	20,181	21	31	25	-
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	85,18	86,32	99,45	100	100
XII	PENANAMAN MODAL						
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	409	138	240	534	951
12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	327.808.252 .544	173.271.17 9	174.818.30 5	920.764.67 8	197.109.26 0.355
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/Pro yek	4,00	3,00	3,00	3,57	0,66

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
12.4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	30,00	-47,14	0,89	0,74	12,63
XIII	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
13.1	persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100
13.2	persentase wirausaha muda	%	10,2	10,1	7,77	7,15	3,23
	Jumlah Wirausaha Muda		1,28	1,297	979	1,375	1325
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	62,07	68,97	68,97	33	38
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	81,25	92,31	89,13	93,66	24
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	53,79	62,28	99,10	231	160
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	36	26	54	77	35
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	2	3	52	77	48
XIV	STATISTIK						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		87,88	87,88	87,88	87,88	100
XV	PERSANDIAN						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	87,88	87,88	87,88	87,88	100
XVI	KEBUDAYAAN						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	1	1	5	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	41	41	41	41	41

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	41	41	41	102	102
XVII	PERPUSTAKAAN						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	48.723	9.943	19.169	31.806	32.057
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	36,021	40,440	42,429	43,929	42.739
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	1,17	1,35	1,28	0,98	1,09
17.4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	156	30	61	87	131
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Exp	12.035	12.859	13.184	13.326	13.326
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	2	5	5	39
XVIII	KEARSIPAN						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	14,71	17,65	20,59	36,36	47,06
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	2	7	7	7	11
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
I	PARIWISATA						
1.1	Kunjungan wisata	%	100,17	5,14	1183	1016	933.100
1.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,85	1,6	1,99	3,05	3,42
1.3	PAD sektor pariwisata (juta Rupiah)	Rupiah	6.991.692.757	6.804.096.854	6.545.917.904	8.879.650.847	9.370.000.000
II	PERTANIAN						
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	0,59	0,01	1,31	0,99	
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	30,91	1,11	15,19	36,77	
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1,00	0,01	0,15	5,61	
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	46,37	53,17	32,61	28,35	49,07
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per	Ton	5,50	3,46	5,59	5,93	6,11

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	hektar						
2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	27,27	16,33	7,69	41,96	32,83
V	PERDAGANGAN						
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	11,20	11,99	12,3	22,5	34,9
VI	PERINDUSTRIAN						
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	13,19	10,38	6,50	21,41	14,25
VIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
8.1	Produksi perikanan	%	131,12	132,66	132,75	132,28	132,8
8.2	Konsumsi ikan	%	94,77	59,71	89,43	89,00	88,57
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	18,80	20,87	12,5	15,82	13,61
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	55,07	75,41	59,74	61,65	55,65
8.7	Nilai tukar nelayan	%	104,67	99,46	104,18	104,19	
	PENUNJANG URUSAN						
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99,53	97,85	97,70	100	96,75
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	99,53	98,11	100	100	94,44
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	99,97	99,89	99,89	99,89	85,05

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	KEUANGAN						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,58	4,62	1,97	1,85	1,16
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,00	1,05	2,37	2,34	2,94
2.5	Persentase belanja pendidikan (20 %)	%	4,16	5,04	20,41	20,32	19,70
2.6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	%	26,29	24,16	27,43	29,55	8,25
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	59,89% : 33,44%	55,63% : 38,85%	62,39% : 35,33%	59,93% : 41,58%	59,02% : 39,85%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0	0	0	0	0
2.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
III	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)	Jp/Tahun	45	45	27	27	31
3.2	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,42	3,14	0,66	2,72	15
3.3	persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	51,76	58,53	90,85	77,20	67,73
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	34	34	35	35	34
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1.598	1.598	1.398	1.335	719
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.054	1.975	2.228	2.246	2.140
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4.1	persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4.2	persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	20	20	25	25	35
	Penerapan SIDA :	%	100	100	100	100	100
4.3	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
V	PENGAWASAN						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	59,55	61,34	50,53	51,00	58
5.2	persentase pelanggaran pegawai	%	0,21	0,85	0,41	0,44	0.35
5.3	Jumlah temuan BPK	Kasus	16	12	13	9	
VI	SEKRETARIAT DEWAN						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi PembentukanPerda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
VII	SEKRETARIAT DAERAH KOTA						
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan		100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian		100	100	100	100	100
	Cakupan fasilitasi penataan standarisasi tatalaksana lingkup		33	33	33	33	33

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Pemkot Parepare						
	Cakupan Pembinaan Sakip		33	33	33	33	33
	Persentase Penyelenggaraan Keprotokoleran		100	100	100	100	100
VIII	KEBANGSANAAN DAN POLITIK						
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase masyarakat yang mendapat pendidikan politik	%	100	100	100	100	100
	Persentase cakupan organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100	100	100	100	100
	persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	27,08	-42,86	-8	3,70	-13,46
	persentase wilayah Kota Parepare berpotensi konflik agama yang ditangani	%	100	100	100	100	100
	persentase penurunan jumlah potensi konflik di lingkungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
	persentase angka kriminalitas per 10.000 penduduk		41,01	32,35	34,2	34,17	34,17



2.1.2.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Parepare Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, sehingga capaian IKU Pemerintah Kota Parepare Tahun 2023 dijadikan bahan evaluasi dalam rangka pencapaian IKU RPJMD. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencanapembangunan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap pencapaian RPJMD Kota Parepare untuk tahun 2023 dilakukan dengan mengukur sejauh mana capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Parepare Tahun 2019-2023 dapat tercapai pada tahun 2023. IKU merupakan indikator penilaian yang ditetapkan berdasarkan tujuan sasaran strategis Kota Parepare yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023.



2.1.2.1.1 Evaluasi Misi Kesatu

Misi kesatu adalah Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, yang bertujuan Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

Tujuan Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan yaitu indikator **Kontribusi Sektor Prioritas Terhadap PDRB** yang menargetkan tahun 2023 sebesar 19,99 persen dan target akhir periode RPJMD sebesar 19,99 persen, namun realisasi tahun 2023 sebesar 19,24 sehingga capaian kinerjanya 96,65 persen. Dan capaian kinerja indikator tujuan RPJMD adalah 96,65 persen.

Sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Sasaran 1, Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan, dengan indikator keberhasilannya adalah **Kontribusi Lapangan Usaha Kesehatan terhadap PDRB**. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 6,02% dan target akhir periode RPJMD 6,02%. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 5,34%, sehingga capaian kinerjanya adalah 88,70%, pencapaian ini belum mencapai target RPJMD dengan target 6,02 persen.
- b. Sasaran 2, Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan, dengan indikator keberhasilannya adalah **Kontribusi Lapangan Usaha Pendidikan terhadap PDRB**. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 7,28% dan target akhir periode RPJMD (Tahun 2023) mencapai 7,28%. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 7,22%, yang berarti belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 99,18%, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasi tahun 2023 belum mencapai target.
- c. Sasaran 3, Meningkatnya kontribusi sektor jasa pariwisata, dengan indikator keberhasilannya adalah
 - **Kontribusi Lapangan Usaha Pariwisata terhadap PDRB**. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 6,69% sedangkan target akhir periode RPJMD (Tahun 2023) mencapai 6,69%. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 6,68%, yang berarti belum mencapai target yang



ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 99,85%, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasinya belum mencapai target.

- **Kontribusi PAD sector pariwisata terhadap total PAD** dalam kontribusi sector prioritas terhadap PDRB. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 7,29% sedangkan target akhir periode RPJMD (Tahun 2023) mencapai 7,29%. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 5,14%, yang berarti belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya hanya adalah 70,51%, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasinya belum mencapai.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata capaian sasaran kinerja Misi Kesatu pada tahun 2023 sebesar 92,90% dengan kategori sangat tinggi, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD.

2.1.2.1.2 Evaluasi Misi Kedua

Misi kedua, Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, dengan tujuan Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan indikator keberhasilannya adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat** menargetkan capaian tahun 2023 sebesar 89,2 persen dengan target RPJMD sebesar 89,20 persen. Realisasi tahun 2023 sebesar 79,76 persen yang berarti capaiannya sebesar 89,42 persen dan capaian tujuan RPJMD Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat sebesar 89,42 persen.

Dengan ditetapkan Sasaran, yaitu :

- a. Sasaran 4, Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar dengan indikator keberhasilan yaitu **Cakupan Capaian SPM**. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen. sedangkan target akhir periode RPJMD (Tahun 2023) mencapai 100 persen. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 92,83 persen, yang berarti belum melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian



kinerjanya adalah 87,77 persen dan untuk target akhir periode RPJMD maka capaian kinerjanya sama sebesar 87,77 persen.

- b. Sasaran 5, Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indicator keberhasilannya adalah **Rata-rata Indeks Pelayanan Publik**. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 4 persen. sedangkan target akhir periode RPJMD (Tahun 2023) mencapai 4,00 persen. Hasil pengukuran yang dilakukan, realisasi pada tahun 2023 mencapai 4,46 persen, yang berarti capaian kinerjanya adalah 111,5 persen melampaui dari target yang ditetapkan dan berdasarkan target akhir periode RPJMD maka capaian kinerjanya sebesar 111,5 pesen.

Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja Misi kedua pada tahun 2023 telah mencapai 94,53% dengan kategori kinerja “sangat tinggi”, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD.



2.1.2.1.3 Evaluasi Misi Ketiga

Misi Ketiga yang ditetapkan adalah Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun indikator kinerja tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi ini, diantaranya:

- a. **PDRB Per Kapita**, yang menargetkan tahun 2023 sebesar 59,61 persen dengan target akhir periode RPJMD sebesar 58,78 persen dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,78 persen atau sama dengan 98,61 persen untuk capaian tahunannya dan pencapaian akhir periode RPJM sebesar 98,61 persen.
- b. **Tingkat Kemiskinan**. Indikator Tingkat Kemiskinan yang targetnya adalah 4,97 persen di tahun 2023 sedang target akhir RPJMD adalah 4,97 persen. Sedang realisasi tahun 2023 sebesar 5,34 persen dengan capaian 92,56 persen dan target akhir RPJMD mencapai 92,56 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2022 yang 5,41%.
- c. **Inflasi**, yang menargetkan angka 6,66 persen di tahun 2023 dan realisasi sebesar 2,22 persen. Angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan sehingga kinerjanya 88,80 persen, dan pencapaian akhir periode RPJMD adalah 88,80 persen dengan target akhir RPJMD 6,66 persen.

Untuk mendukung tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis, yaitu :

- a. Sasaran 6, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator kinerja adalah **Pertumbuhan Ekonomi**, yang ditargetkan pada tahun 2023 mencapai 6,36% dan target ini merupakan target akhir periode RPJMD. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2023 menurun pada angka 3,88%, yang berarti capaian kinerjanya sama dengan 61,01%. Sehingga capaian kinerja indikator Pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD adalah 61,01%.
- b. Sasaran 7, Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat dengan indikator kinerja **Indeks Gini (indeks)**. Target tahun 2023 sebesar 0,331 dan target akhir periode RPJMD sebesar 0,331. Realisasi Indeks Gini pada tahun 2023 adalah 0,381, yang berarti capaian kinerjanya adalah 84,89%. Sehingga kinerja akhir periode RPJMD capaian adalah 84,89%.



Realisasi indeks gini tahun 2023 mengalami menurun dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 0,379.

- c. Sasaran 8, Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja, yaitu: **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, yang pada tahun 2023 diharapkan dapat ditekan menjadi 6,87% dan akhir periode RPJMD menjadi 6,87%. Realisasi tahun 2023 sebesar 5,86%, yang berarti capaian kinerjanya sebesar 114,70%. Dan pencapaian akhir periode RPJMD, adalah sebesar 114,70%. Realisasi TPT tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,60%.
- d. Sasaran 9, Terjaganya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dalam mendukung kegiatan perekonomian daerah. Dengan indikator keberhasilan kinerjanya adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, target tahun 2023 yang merupakan akhir tahun RPJMD pada angka 85 persen, dan realisasinya pada tahun 2023 adalah 71,68 persen yang berarti capaian kinerjanya 84,33 persen, dan capaian kinerjanya terhadap target akhir RPJMD sebesar 84,33 persen.

Dari hasil capaian kinerja indikator-indikator sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja Misi Ketiga untuk tahun 2023 mencapai 89,78% dengan kategori “Tinggi, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD”.

2.1.2.1.4 Evaluasi Capaian Misi Keempat

Misi keempat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terbarukan dan Berkarakter. bertujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan indikator keberhasilan kinerja, adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Pada tahun 2023, IPM Kota Parepare ditargetkan sebesar 78,98 dan pada akhir periode RPJMD ditargetkan mencapai 78,98 . Realisasi IPM Kota Parepare tahun 2023 sebesar 79,03 yang berarti kinerjanya mencapai 100,06 persen, sehingga capaian kinerja akhir periode RPJMD adalah 100,06 persen. Realisasi tahun 2023 juga lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 yang hanya 78,54.

Sasaran dari misi ke empat, yaitu:

- 1) Sasaran 10, Indeks Pendidikan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 76,49 persen. Sedangkan untuk akhir periode RPJMD adalah 76,49 persen. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 76,06 atau capaiannya 99,44 persen dari target yang ditetapkan dan pencapaian pada akhir periode RPJMD adalah 99,44.



- 2) Indeks Kesehatan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 79,85 dan terealisasi hanya 79,66 sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,76 persen dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 79,85 maka capaian akhir RPJM adalah sebesar 99,76 persen.
- 3) Pengeluaran Per Kapita. Untuk tahun 2023 ditargetkan Rp 14,343 juta dan juga merupakan target akhir periode RPJMD. Realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp 14.495 juta dengan capaian kinerja 101,06 persen dari target yang ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja akhir periode RPJMD 101,06 persen.
- 4) Indeks pemberdayaan gender, yang ditargetkan sebesar 88,94 untuk tahun 2023 dan juga target akhir periode RPJMD. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 71,81 atau mencapai 80,07 Persen. Sehingga capaian akhir periode RPJMD adalah sebesar 80,07 persen

Rata-rata capaian kinerja Misi keempat pada tahun 2023 adalah 97,57 persen dengan kategori “sangat tinggi, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD”.

2.1.2.1.5 Evaluasi Misi Kelima

Misi Kelima dalam RPJMD adalah Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dengan Pendekatan Informasi dan Teknologi Menuju Kota Cerdas (Smart City) Guna Menghadirkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel. Untuk melaksanakan misi kelima ini, telah ditetapkan tujuan, yaitu: Mengembangkan Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di Semua Tingkat Pemerintahan, dengan indikator kinerjanya adalah :

- a. Indeks reformasi birokrasi dengan target tahun 2023 sebesar 70 dan juga merupakan target akhir RPJMD. Realisasi tahun 2023 sebesar 61,12 yang berarti capaiannya sebesar 87,31%, sehingga capain akhir RPJMD adalah 87,31 persen.
- b. Untuk pencapaian tujuan ini maka telah ditetapkan sasaran strategisnya adalah Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, dengan indikator kinerja :
 1. Opini BPK, yang ditargetkan WTP dan realisasinya pada tahun 2023 adalah WTP, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 persen.



2. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan target tahun 2023 adalah BB, sedang target akhir periode RPJMD adalah BB. Realisasi hasil penilaian SAKIP tahun 2023 adalah B, sehingga capaiannya hanya 75,00 persen.
3. Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditargetkan pada tahun 2023 dengan kategori Baik (B). Realisasi tahun 2023 sebesar 2,62 dalam kategori Baik (B) sehingga capaian kinerjanya adalah 100 persen.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Misi Kelima adalah 93,60 persen dengan kategori “Sangat Tinggi, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD.

2.1.2.1.6 Evaluasi Capaian Misi Keenam

Misi keenam yang merupakan misi terakhir adalah Mengembangkan Iklim Keummatan Sebagai Bentuk Perkuatan Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Nyata Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan mengharapkan masyarakat dalam Arti Luas Turut Hadir di Dalamnya. Untuk melaksanakan misi ini, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya.

Meningkatnya kualitas pelayanan serta kegiatan keagamaan.

- a. Indikator tujuan yang ditetapkan adalah Angka kriminalitas yang tertangani, dengan target tahun 2023 sebesar 54,00 persen. Realisasi pada tahun 2023 adalah 38,61 % sehingga capaian kinerjanya 71,50 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 54,00 maka capaiannya adalah 71,50 persen
- b. indikator sasaran strategis adalah indeks kerukunan antar umat beragama. Target tahun 2023 adalah 85 persen dengan target RPJMD akhir tahun adalah 85,00 persen. Realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 85 persen sehingga capaian kinerjanya adalah 95,53 persen dan sehingga pencapaian akhir RPJMD adalah 95,53%.

Rata-rata capain kinerja Misi Keenam adalah 81,02% dengan kategori “tinggi”, yang merupakan pencapaian akhir periode RPJMD.

Dari capaian sasaran setiap misi, maka disimpulkan rata-rata capaian misi RPJMD capaiannya adalah 91,58 persen dengan kategori “Tinggi”.



Secara lengkap Hasil Evaluasi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 untuk pelaksanaan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



Tabel 2.2
HASIL EVALUASI RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2018 -
2023 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	INDIKATOR KINERJA	Satuan (%)	DATA CAPAIAN AWAL RPJMD TAHUN 2020	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN						CAPAIAN TARGET TAHUN						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2023		
					2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022		2023				
					K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan																									
I.1	Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan	Kontribusi Sektor prioritas terhadap PDRB	Persen	18,47	19,99	18,97	220.314.311	19,47	319.234.616	19,99	312.270.179	18,36	86.615.966	18,41	114.668.104	19,24	234.572.684	96,78	39,31	94,56	35,92	96,25	75,12	96,25	75,12
I.1.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan	Kontribusi Lapangan Usaha Kesehatan Terhadap PDRB	Persen	5,31	6,02	5,54	182.946.698	5,78	265.537.450	6,02	232.808.413	5,58	51.972.215	5,38	91.887.476	5,34	207.555.574	100,72	28,41	93,08	34,60	88,70	89,15	88,70	89,15
I.1.2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan	Kontribusi Lapangan Usaha Pendidikan Terhadap PDRB	Persen	6,86	7,28	7,00	36.938.613	7,14	45.852.166	7,28	72.411.766	6,45	34.243.612	6,58	22.294.720	7,22	26.695.666	92,14	92,70	92,16	48,62	99,18	36,87	99,18	36,87
I.1.3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Pariwisata	Kontribusi Lapangan Usaha Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	6,30	6,69	6,43	429	6,55	7.845.000	6,69	7.050.000	6,33	400,139	6,45	485,908	6,68	321.444	98,44	93,27	98,47	6,19	99,85	4,56	99,85	4,56
		Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap Total PAD	Persen	4,22	7,29	5,06		6,08		7,29		4,20		5,31		5,14		83,00		87,34		70,51		70,51	
Rata-rata Capaian Kinerja Misi I Akhir Tahun 2023																	95,18		94,69				92,90		
Predikat																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		
II Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Dasar dan Peningkatan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Menuju Pelayanan Prima dan profesional serta Berkeadilan																									
II.1	Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengotimalkan pemenuhan hak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	71,00	89,20	80,50	44.200.449	85,00	75.988.631	89,2	104.389.978	76,75	33.708.133	79,76	32.006.217	79,76	42.504.287	95,34	76,26	93,84	42,12	89,42	40,72	89,42	40,72

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	INDIKATOR KINERJA	Satuan (%)	DATA CAPAIAN AWAL RPJMD TAHUN 2020	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN						CAPAIAN TARGET TAHUN						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2023			
					2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022		2023		2023			
					K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dasar masyarakat																										
II.1.1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Capaian SPM	Persen	100,00	100,00	100,00	16.315.376	100,00	38.367.911	100	54.476.190	85,18	13.712.801	92,83	4.825.322	87,77	7.555.126	85,18	84,05	92,83	12,58	87,77	13,87	87,77	13,87	
II.1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks indeks pelayanan publik	Point	3,50	4,00	3,65	27.885.073	4,00	37.620.720	4	49.913.788	4,50	19.995.332	4,46	27.180.895	4,46	34.949.161	123,29	71,71	111,50	72,25	111,50	70,02	111,50	70,02	
Rata-rata Capaian Kinerja Misi II Akhir Tahun 2023																		99,79		98,00				94,53		
Predikat																		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		
III	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Perekonomian Serta Kemampuan Daerah Dalam Menghadirkan Sumber-Sumber Ekonomi Baru Berdasarkan Potensi Yang Dimiliki																									
III.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	49,92	59,61	52,96		56,19		59,61		51,18		56,16		58,78		96,64		99,95		98,61		98,61	45,16	
		Tingkat Kemiskinan	Persen	5,44	4,97	5,28	164.385.095	5,12	275.637.109		4,97		5,40		5,41		5,34		97,73		94,34		92,56		92,56	
		Inflasi	Persen	1,61	2,50	2,50		2,50		2,5		2,91		6,66		2,22		83,60		66,4		88,80		88,80		
III.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,08	6,36	4,77	131.405.518	6,20	241.608.231	6,36	216.896.453	4,41	118.528.588	5,93	98.486.476	3,88	93.787.617	92,45	90,20	95,65	40,76	61,01	43,24	61,01	43,24	
III.1.2	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Gini ratio)	Indeks	0,37	0,33	0,346	15.522.193	0,338	16.120.747	0,331	20.410.000	0,381	15.125.757	0,379	10.110.518	0,381	9.835.911	89,88	97,45	87,87	62,72	84,89	48,19	84,89	48,19	
III.1.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,14	5,98	6,87	614.984	6,41	794.985	6,87	1.145.759	6,72	597.917	5,60	448.933	5,86	302.824	102,14	97,22	112,64	56,47	114,70	26,43	114,70	26,43	
III.1.4	Terjaganya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dalam mendukung kegiatan perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,04	85,00	80,00	16.842.400	82,00	17.113.146	85	17.844.640	83,87	14.220.249	75,91	12.643.936	71,68	11.804.575	104,84	84,43	92,57	73,88	84,33	66,15	84,33	66,15	
Rata-rata Capaian Kinerja Misi III Akhir Tahun 2023																		94,99		69,90				89,78		
Predikat																		Sangat Tinggi		Sedang				Tinggi		
IV	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Terbarukan dan Berkarakter																									
IV.1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Point	77,86	78,98	78,17	6.772.598	78,50	11.468.355	78,98	18.467.844	78,21	14.853.723	78,54	5.290.994	79,03	16.838.321	100,05	219	100,05	46,14	100,06	91,18	100,06	91,18	
IV.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	75,11	76,49	75,57	464.75	76,08	595	76,49	1.153.950	75,81	452.466	75,87	291.597	76,06	10.874.051	100,32	97	99,72	49,01	99,44	942,33	99,44	942,33	
IV.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	77,88	79,85	79,20	1.883.678	79,53	4.989.420	79,85	7.748.891	78,94	10.618.518	79,34	1.262.166	79,66	2.281.564	99,67	564	99,76	25,30	99,76	29,44	99,76	29,44	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	INDIKATOR KINERJA	Satuan (%)	DATA CAPAIAN AWAL RPJMD TAHUN 2020	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN						CAPAIAN TARGET TAHUN						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2023		
					2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022		2023		2023		
					K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
IV.1.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	13716	14343	13922	2.427.490	14131	3.334.935	14343	5.760.003	13,786	2.252.064	14,027	2.574.573	14.495	2.506.276	99,02	93	99,26	77,20	101,06	43,51	101,06	43,51
IV.1.4	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	79,07	88,94	82,23	1.996.680	85,52	2.549.000	88,94	3.805.000	70,86	1.530.674	71,21	1.162.658	71,85	1.176.429	86,17	77	83,27	45,61	80,78	30,92	80,07	30,92
Rata-rata Capaian Kinerja Misi IV Akhir Tahun 2022																	98,17		98,88				97,57		
Predikat																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		
V	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel																								
V.1	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	60,00	70,00	62,50	504.926.530	65,00	546.660.026	70	687.110.205	64,35	50.594.009	63,98	448.652.547	61,12	505.655.624	102,96	10,02	98,43	82,07	87,31	73,59	87,31	73,59
V.1.1	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	491.334.030	WTP	532.583.461	WTP	668.489.677	WTP	39.286.551	WTP	438.778.281		493.002.840	100,00	8,00	100,00	82,39	-	73,75	100,00	73,75
		Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	B		BB		BB		B		B		B	100,00		75,00		100-		100	#DIV/0!	
		Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Baik	Baik	Baik	13.592.500	Baik	14.076.565	Baik	18.620.528	Cukup	11.307.458	Baik	9.874.266	Baik	12.652.784	100,00	83,19	100,00	70,15	100,00	67,95	100,00	67,95
Rata-rata Capaian Kinerja Misi V Akhir Tahun 2023																	101,48		95,05				93,66		
Predikat																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		
VI	Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya																								
VI.1	Mendorong iklim keummatan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat berbasis budaya lokal	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Angka indeks	78,00	85,00	81,00	1.409.993	83,00	4.029.131	85	4.914.131	74,60	2.483.230	74,00	2.661.457	76,95	13.494.537	92,10	176,12	89,16	66,06	90,53	274,61	90,53	274,61
VI.1.1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	48,00	54,00	50,00	1.409.993	52,00	4.029.131	54	4.914.131	34,20	2.483.230	40,19	2.661.457	38,61	13.494.537	68,40	176,12	77,29	66,06	71,50	274,61	71,50	274,61
Rata-rata Capaian Kinerja Misi VI Akhir Tahun 2023																	80,25		88,04				81,02		
Predikat																	Sedang		Sedang				Tinggi		

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	INDIKATOR KINERJA	Satuan (%)	DATA CAPAIAN AWAL RPJMD TAHUN 2020	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	TARGET RPJMD TAHUN						CAPAIAN TARGET TAHUN						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN 2023																				
					2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022		2023																						
					K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Ribu Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
TOTAL CAPAIAN EVALUASI RPJMD																									94,98		90,76															91,58	
Predikat																									Sangat Tinggi		Sangat Tinggi															Sangat Tinggi	



2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Dalam pelaksanaan evaluasi RKPD pada tahun 2023 ditahun berjalan ini menggunakan suatu standar atau kriteria yang sebagai bahan analisis pencapaian target anggaran dan kinerja. Rata-rata persentase capaian diukur/dibagi dalam tiga kriteria yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan capaian realisasi 0 – 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan capain realisasi lebih besar dari >20 – 45 persen dan kategori Tinggi untuk perangkatdaerah dengan realisasi diatas 45 persen.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Capaian Realisasi Pendanaan dan Kinerja

No	Kriteria Penilaian	Interval Nilai Capaian	Simbo l
1	Rendah	0-20	R
2	Sedang	>20-45	S
3	Tinggi	>45	T

Tahapan secara runut dalam penggambaran awal penyajian evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 tahun berjalan penggambaran pencapaian dimulai pada rekapitulasi berapa jumlah program kegiatan dan sub kegiatan serta sandingan jumlah indikatornya guna menjaga konsistensi jumlah program kegiatan sub kegiatan sebelum dan setelah mengalami perubahan kemudian penggambaran mengenai penjelasan pencapaian pendanaan dan kinerja pada RKPD sampai dengan triwulan II dengan menggunakan kriteria diatas.

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024

Sebagai informasi terkait jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD 2024 yang terakomodir di APBD



Tahun 2024 tersaji dalam tabel yakni seberapa banyak jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Keg.	Jumlah Sub Keg.
1	Dinas Pendidikan	8	19	70
2	Dinas Kesehatan	5	20	77
3	RS Hasri Ainun Habibie	3	8	18
4	RSUD. A. Makkasau	2	3	3
5	Dinas Pekerjaan Umum	10	21	66
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	6	12	38
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	40
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	9	25
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	33
10	Dinas Sosial	7	14	45
11	Dinas Tenaga Kerja	9	19	49
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	19	48
13	Dinas Ketahanan Pangan	5	14	42
14	Dinas Lingkungan Hidup	6	11	29
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	13	46
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	12	47
17	Dinas Perhubungan	2	14	44
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	14	58
19	Dinas Perdagangan	5	11	33
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	14	48



No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Keg.	Jumlah Sub Keg.
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	22	58
22	Dinas Perpustakaan	4	14	47
23	Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan	9	25	57
24	Sekretariat Daerah Kota	3	20	68
25	Sekretariat Dprd	2	14	63
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	17	71
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	11	46
28	Badan Keuangan Daerah	4	15	79
29	Inspektorat Daerah	3	10	40
30	Kecamatan Bacukiki	4	11	35
31	Kecamatan Bacukiki Barat	4	11	35
32	Kecamatan Soreang	4	10	32
33	Kecamatan Ujung	4	11	37
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	47
JUMLAH		160	469	1,574



Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 34 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah keseluruhan program sebanyak 160, untuk jumlah kegiatan 469 dan jumlah sub kegiatan 1.574.

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Terkait Informasi realisasi pencapaian realisasi pendanaan dan realisasi fisik secara persentase digambarkan seberapa besar anggaran yang telah terserap sampai dengan Triwulan II, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024.

Untuk lebih jelasnya, rincian hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah Kota Parepare Tahun 2024 hingga triwulan II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan
Triwulan II

No.	SKPD	PAGU ANGGARAN APBD POKOK (Rp)	Capaian Tahunan Triwulan II		
			Kinerja (%)	Anggaran	
				Persen	Rupiah
1	Dinas Pendidikan	222.679.749.486,00	49,61	31,63	70.443.076.562,00
2	Dinas Kesehatan	104.539.637.991,00	50,27	28,96	30.279.828.734,00
3	RS Hasri Ainun Habibie	50.029.805.914,00	48,52	29,71	14.865.860.695,00
4	Rsud. A. Makkasau	136.494.134.365,00	72,50	61,29	83.654.527.159,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	36.644.243.256,00	23,02	8,05	2.949.529.489,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.797.553.290,00	42,21	22,30	1.738.523.217,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	8.382.382.412,00	53,39	44,47	3.727.396.042,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.969.815.766,00	53,71	39,01	3.108.899.525,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.137.440.439,00	54,79	30,51	1.567.587.845,00
10	Dinas Sosial	5.100.155.845,00	64,83	36,49	1.860.982.637,00
11	Dinas Tenaga Kerja	14.585.309.057,00	38,89	15,49	2.259.389.975,00



No.	SKPD	PAGU ANGGARAN		Capaian Tahunan Triwulan II		
		APBD POKOK (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran		
				Persen	Rupiah	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.137.540.845,00	78,31	31,89	1.638.363.557,00	
13	Dinas Ketahanan Pangan	5.366.921.907,00	48,95	24,71	1.326.165.027,00	
14	Dinas Lingkungan Hidup	19.224.830.186,00	54,09	40,93	7.868.708.064,00	
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.194.827.694,00	55,33	40,85	1.713.771.564,00	
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.538.650.331,00	44,99	27,60	2.080.414.525,00	
17	Dinas Perhubungan	9.981.153.670,00	49,44	35,24	3.517.735.958,00	
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	13.426.941.524,00	48,51	35,51	4.768.461.647,00	
19	Dinas Perdagangan	6.477.245.125,00	53,61	44,15	2.859.786.273,00	
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.519.524.341,00	54,01	36,32	2.367.823.306,00	
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	10.115.070.645,00	49,49	24,88	2.516.241.067,00	
22	Dinas Perpustakaan	4.454.158.063,00	48,93	40,34	1.796.683.971,00	
23	Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan	10.790.747.354,00	43,06	33,28	3.591.528.577,00	
24	Sekretariat Daerah Kota	42.901.768.349,00	43,57	32,35	13.879.062.296,00	
25	Sekretariat Dprd	57.534.183.281,00	47,58	40,39	23.236.886.233,00	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.381.270.053,00	47,26	28,28	2.370.515.185,00	
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.966.700.818,00	43,50	41,78	2.492.875.865,00	
28	Badan Keuangan Daerah	52.169.433.544,00	40,37	31,09	16.220.261.044,00	
29	Inspektorat Daerah	7.672.808.130,00	55,63	41,93	3.216.825.525,00	
30	Kecamatan Bacukiki	8.105.996.222,00	54,01	41,87	3.394.262.431,00	
31	Kecamatan Bacukiki Barat	11.856.873.647,00	49,20	39,53	4.686.569.969,00	
32	Kecamatan Soreang	12.064.034.621,00	57,80	41,51	5.008.106.704,00	
33	Kecamatan Ujung	9.052.968.841,00	50,01	32,81	2.970.243.594,00	
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.473.307.321,00	43,10	14,51	4.276.607.021,00	
	Jumlah	947.767.184.333,00	50,37	35,27	334.253.501.283,00	

Jumlah Program	160
Jumlah Kegiatan	469
Jumlah Sub Kegiatan	1.574



Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kota Parepare pada triwulan II Tahun 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2024 sebesar Rp947.767.184.333,- untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Parepare yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah;
2. Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2024 sebesar Rp334.253.501.283 atau sama dengan 35,27 persen dari APBD Kota Parepare. Namun capaian ini lebih rendah dibandingkan triwulan II tahun 2023 sebesar 37,05 persen.
3. Capaian kinerja Kegiatan Pembangunan tingkat kota hingga Triwulan II sebesar 50,37 persen, capaian ini lebih rendah jika dibanding Triwulan II tahun 2023 sebesar 51,57 Persen.
4. Perangkat Daerah dengan capaian pendanaan **tertinggi** adalah urutan pertama RSUD A. Makkasau dengan capaian 61,29 persen atau setara dengan kemudian urutan kedua Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan capaian 44,47 persen kemudian diurutan ketiga adalah Dinas Perdagangan dengan capaian 44,15 persen.
5. Perangkat Daerah dengan capaian pendanaan **terendah** adalah urutan pertama Dinas Tega Kerja dengan capaian 15,49 persen, kemudian urutan kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian 14,51 persen, kemudian diurutan ketiga adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan capaian 8,05 persen.
6. Perangkat Daerah dengan capaian kinerja **tertinggi** adalah urutan pertama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian 78,31 persen, kemudian urutan kedua adalah RSUD. A. Makkasau dengan capaian 72,50 persen, urutan ketiga adalah Dinas Sosial dengan capaian 64,83 persen.
7. Perangkat Daerah dengan capaian kinerja **terendah** adalah urutan pertama adalah Badan Keuangan Daerah dengan capaian 40,37 persen, kemudian urutan kedua adalah Dinas Tenaga Kerja dengan



capaian 38,89 persen, urutan ketiga adalah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan capaian 23,02 persen.

8. Faktor-faktor yang dianggap menjadi penghambat dalam ketercapaian pendanaan dan kinerja APBD Triwulan II adalah
- Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan bagian pengadaan barang dan jasa pada secretariat daerah dalam proses pelelangan.
 - Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan konsultan perencana dan PPTK.
 - Alur kas pada DPA tidak sesuai dengan tahapan rencana kegiatan sehingga menghambat dalam proses pencairan keuangan.
 - Kendala pada SP2D yang tidak terbit sehingga terhambat pada pencairan LPJ.
9. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam ketercapaian pendanaan dan kinerja APBD Triwulan II adalah
- Komitmen pimpinan dalam mendukung ketercapaian dan kelancaran alur kas
 - Didukung dengan percepatan proses pertanggungjawaban diantaranya sistem yang memadai, SDM yang berhubungan dengan proses pencairan yang kompeten.
 - ketersediaan anggaran kegiatan

Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pendanaan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.6

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Keg.	Jumlah SubKegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	Dinas Pendidikan	8	1	1	6	19	12	6	1	70	51	12	7
2	Dinas Kesehatan	5	2	1	2	20	14	0	6	77	60	6	11
3	RS Hasri Ainun Habibie	3	3	0	0	8	1	0	7	18	9	2	7
4	RSUD. A. Makkasau	2	0	0	2	3	2	0	1	3	2	0	1
5	Dinas Pekerjaan Umum	10	9	1	0	21	18	3	0	66	53	10	3
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	6	5	1	0	12	8	1	3	38	24	4	10
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	0	2	9	2	3	4	40	21	4	15
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	0	0	2	9	2	3	4	25	16	3	6
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	2	0	10	6	2	2	33	18	3	12
10	Dinas Sosial	7	4	1	2	14	6	2	6	45	18	6	21
11	Dinas Tenaga Kerja	9	8	0	1	19	14	2	3	49	37	3	9
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	2	2	3	19	6	2	11	48	28	3	17
13	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	1	0	14	10	2	2	42	31	1	10
14	Dinas Lingkungan Hidup	6	2	1	3	11	3	2	6	29	8	7	14
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	0	0	13	9	0	4	46	33	1	12
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	1	1	2	12	2	3	7	47	24	1	22
17	Dinas Perhubungan	2	0	1	1	14	6	4	4	44	29	9	6

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Keg.	Jumlah SubKegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	1	2	2	14	4	3	7	58	27	6	25
19	Dinas Perdagangan	5	1	1	3	11	2	5	4	33	12	7	14
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	2	2	0	14	7	6	1	48	29	12	7
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	2	4	1	22	12	3	7	58	48	3	7
22	Dinas Perpustakaan	4	1	2	1	14	7	5	2	47	24	13	10
23	Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan	9	8	1	0	25	16	5	4	57	38	7	12
24	Sekretariat Daerah Kota	3	0	2	1	20	4	8	8	68	28	16	24
25	Sekretariat DPRD	2	1	0	1	14	7	3	4	63	47	11	5
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	2	0	17	10	7	0	71	49	15	7
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	1	2	0	11	3	5	3	46	17	9	20
28	Badan Keuangan Daerah	4	2	2	0	15	6	9	0	79	53	14	12
29	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	10	6	3	1	40	20	12	8
30	Kecamatan Bacukiki	4	3	0	1	11	4	6	1	35	18	9	8
31	Kecamatan Bacukiki Barat	4	3	1	0	11	7	3	1	35	25	6	4
32	Kecamatan Soreang	4	1	1	2	10	4	1	5	32	12	5	15
33	Kecamatan Ujung	4	4	0	0	11	11	0	0	37	37	0	0

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Keg.	Jumlah SubKegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	0	0	12	12	0	0	47	47	0	0
JUMLAH		160	87	35	38	469	243	107	119	1,574	993	220	361



Informasi tentang **capaian pendanaan** memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0-20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20–45 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45 persen, ini didasarkan atas asumsi capaian kinerja keuangan didukung dari kesiapan alur kasyang tersedia serta tingkat capaian kinerja yang diharapkan menjadi rujukan dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 160 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori **rendah** ada sebanyak 87 program. Untuk capaian kinerja kategori **sedang** sebanyak 35 program, dan untuk capaian kinerja kategori **tinggi** sebanyak 38 program.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 469 kegiatan pembangunan yang



dilaksanakan pada tahun 2024. Terdapat 243 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori **rendah** yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam karegori **sedang** sebanyak 107 kegiatan, dan kategori **tinggi** sebanyak 119 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan
Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing- masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.574 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat 993 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaannya masih **rendah**, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan **sedang** terdapat 220 sub kegiatan, dan 361 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan **tinggi** pada triwulan II.

Berikut ini adalah Informasi tentang **capaian kinerja** yang memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 –

45 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 45 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Untuk melihat lebih lengkap terkait rincian capaian kinerja hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam **Pelaksanaan Pelaksanaan RKPD 2024** dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelaksanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan			Jumlah Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan			Jumlah Sub Keg.	Jumlah SubKegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan		
			0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	Dinas Pendidikan	8	6	0	2	19	12	1	6	70	57	1	12
2	Dinas Kesehatan	5	0	0	5	20	0	0	20	77	0	0	77
3	RS Hasri Ainun Habibie	3	0	1	2	8	0	2	6	18	0	6	12
4	RSUD. A. Makkasau	2	0	0	2	3	0	0	3	3	1	0	2
5	Dinas Pekerjaan Umum	10	7	3	0	21	10	4	7	66	25	6	35
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	6	5	0	1	12	6	1	5	38	14	5	19
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	0	2	9	1	0	8	40	3	4	33
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	0	1	1	9	1	2	6	25	6	9	10
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	1	0	1	10	3	2	5	33	13	1	19
10	Dinas Sosial	7	0	1	6	14	0	1	13	45	1	7	37
11	Dinas Tenaga Kerja	9	8	0	1	19	15	3	1	49	23	10	16
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	0	1	6	19	0	4	15	48	3	9	36
13	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	0	1	14	9	0	5	42	18	0	24
14	Dinas Lingkungan Hidup	6	0	1	5	11	1	2	8	29	2	4	23
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	4	0	1	13	8	0	5	46	23	0	23
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	0	2	2	12	0	6	6	47	2	15	30
17	Dinas Perhubungan	2	0	0	2	14	0	5	9	44	0	11	33
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	4	0	1	14	12	0	2	58	47	0	11

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Perangkat Daerah	Jumlah Prog.	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan			Jumlah Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan			Jumlah Sub Keg.	Jumlah SubKegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pelaksanaan		
			0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%		0-20%	20-45%	>45%
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
19	Dinas Perdagangan	5	0	1	4	11	0	4	7	33	13	3	17
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	0	1	3	14	0	2	12	48	20	9	19
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	0	2	5	22	4	5	13	58	2	19	37
22	Dinas Perpustakaan	4	1	2	1	14	2	4	8	47	11	9	27
23	Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan	9	0	4	5	25	0	7	18	57	1	18	39
24	Sekretariat Daerah Kota	3	0	0	3	20	0	8	12	68	0	30	38
25	Sekretariat DPRD	2	0	0	2	14	0	6	8	63	0	40	23
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	0	0	4	17	0	6	11	71	0	34	37
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	0	1	2	11	0	3	8	46	3	8	35
28	Badan Keuangan Daerah	4	0	1	3	15	2	1	12	79	11	29	39
29	Inspektorat Daerah	3	0	0	3	10	0	0	10	40	0	4	36
30	Kecamatan Bacukiki	4	0	0	4	11	0	0	11	35	0	10	25
31	Kecamatan Bacukiki Barat	4	0	0	4	11	0	1	10	35	5	11	19
32	Kecamatan Soreang	4	0	0	4	10	0	0	10	32	0	0	32
33	Kecamatan Ujung	4	0	0	4	11	0	2	9	37	0	13	24
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	0	2	4	12	0	3	9	47	9	10	28
Jumlah		160	40	24	96	469	86	85	298	1,574	313	335	927



Berdasarkan tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan RKPD 2024 Triwulan II

- 1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program** Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 160 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori **rendah** atau di bawah 20 persen terdapat 40 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori **sedang** terdapat 24 program, selebihnya sebanyak 96 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori **tinggi** yang pencapaiannya lebih dari 45 persen pada triwulan II Tahun 2024.
- 2. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan** Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 469 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 86 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih **rendah**, sedangkan yang capaian kinerja kategori **sedang** terdapat 85 kegiatan, selebihnya terdapat 298 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.
- 3. Evaluasi Capaian Kinerja Output pada Level sub Kegiatan** Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.574 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih **rendah** atau dibawah 20 persen terdapat 313 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja **sedang** sebanyak 335 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori **tinggi** sebanyak 927 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 45 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.



2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Secara umum gambaran terkait hambatan dan kendala dalam melaksanakan pencapaian kinerja kegiatan triwulan Kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya regulasi atau Peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang disebabkan oleh penggabungan atau perubahan indikator dalam kinerja baik itu di level program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan
6. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.
7. Masih rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan beberapa kendala teknis terkait penyiapan dokumen pendukung dalam proses pertanggungjawaban secara fungsional dan administratif.

2.3.2 Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2024 sampai



dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Penegasan terkait Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi.
2. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
3. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
4. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan.
5. Terkait pencapaian kinerja program, kegiatan sampai pada sub kegiatan agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan untuk triwulan berikutnya dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan perubahan.
6. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
7. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
8. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas secara umum penjelasan terkait faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, sebagai rekomendasi dan tindak lanjut pencapain kinerja untuk pelaksanaan di



tahun berjalan sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan kerja Bappeda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh PPTK dalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Badan/Dinas/Perangkat Daerah dalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program dalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten dalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja perlu penyeragaman atau metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan indikator kinerja yang akan dicapai;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMD.
12. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
13. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran;
14. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya diperlukan data dan informasi yang akurat, sehingga



perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.



BAB III

Pemerintah Kota Parepare

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini sebagai rujukan untuk dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2024. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro dan kemampuan keuangan daerah Tahun 2023.

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional dan regional. Pemerintah Kota Parepare berupayan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

3.1.1. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti



oleh Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen dibanding triwulan IV-2023 (Q-to-Q). Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam di antaranya Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,48 persen; dan Konstruksi sebesar 2,57 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,19 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,25 persen.

Dari sisi PDB menurut Pengeluaran, Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh 5,11 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 24,29 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 19,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,79 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,77 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh semakin menguatnya permintaan global pascareresi dan stagflasi, sedangkan pertumbuhan impor barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik. Penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk manufaktur dan jasa



serta peningkatan peran dalam rantai pasok global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan, bahan baku, logistik, pembiayaan dan fiskal untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagangan termasuk informasi pasar, standar dan buyer dari negara mitra; (iv) peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran barang dan jasa terintegrasi berbasis digital; (v) perkuatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan (vi) penguatan SDM yang mendukung ekspor barang dan jasa termasuk edukasi bagi UMKM.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2024 masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen terhadap PDB; diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,85 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,19 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,89 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2024, dengan pertumbuhan (Y-on-Y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen; disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen; Pulau Kalimantan sebesar 6,17 persen; serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatra mengalami perlambatan pertumbuhan (Y-on-Y) masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,24 persen.



Gambar 3.1
Pertumbuhan Dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah



Sumber : BPS, 2024

Tabel 3.1
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	597,6	603,8	613,8	339,1	327,1	327,1
B. Pertambangan dan Penggalian	600,9	510,0	493,9	214,3	240,4	234,2
C. Industri Pengolahan	941,6	1.011,9	1.019,6	613,3	640,8	638,6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	52,7	56,8	55,3	31,0	33,5	32,6
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	3,4	3,5	2,6	2,7	2,7
F. Konstruksi	501,2	556,1	541,2	285,5	315,3	307,2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	657,1	687,0	695,4	389,6	407,0	407,5
H. Transportasi dan Pergudangan	281,8	326,2	313,4	130,6	144,3	141,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,8	139,1	138,5	91,2	100,7	99,8
J. Informasi dan Komunikasi	212,3	228,1	232,9	194,7	207,5	211,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	218,4	221,3	227,8	124,4	126,4	129,2
L. Real Estat	124,9	127,8	128,5	85,0	86,8	87,1
M,N. Jasa Perusahaan	90,7	99,4	102,0	55,4	59,7	60,8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,2	164,3	177,7	89,1	101,7	106,0
P. Jasa Pendidikan	132,8	160,3	147,2	82,3	98,5	88,3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,4	69,6	64,7	38,3	46,2	42,8
R,S,T,U. Jasa Lainnya	96,9	107,3	108,2	58,6	63,8	63,8
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	4.837,5	5.072,4	5.063,6	2.825,0	3.002,4	2.980,6
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	234,0	230,1	224,7	136,5	136,7	132,3
Produk Domestik Bruto (PDB)	5.071,5	5.302,5	5.288,3	2.961,5	3.139,1	3.112,9

Sumber : BPS, 2024



Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2024 terhadap Triw IV-2023 (Q-to-Q)	Triw I-2024 terhadap Triw I-2023 (Y-on-Y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2024 (Y-on-Y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	-3,54	-0,41
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,56	9,31	0,68
C. Industri Pengolahan	-0,35	4,13	0,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,47	5,35	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,77	4,44	-0
F. Konstruksi	-2,57	7,59	0,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,12	4,58	0,60
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,63	8,65	0,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,88	9,39	0,29
J. Informasi dan Komunikasi	1,71	8,39	0,55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	3,91	0,16
L. Real Estat	0,37	2,54	0,07
M,N. Jasa Perusahaan	1,70	9,63	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,19	18,88	0,57
P. Jasa Pendidikan	-10,34	7,34	0,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-7,48	11,64	0,15
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,06	8,92	0,18
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	-0,72	5,51	5,26
Pajak Dikurang Subsidy Atas Produk	-3,25	-3,14	-0,15
Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,83	5,11	5,11

Catatan: q-to-q :PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y :PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
-0 :Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber : BPS, 2024

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata;
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan;
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat;
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata;
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau.



Tabel 3.3
Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2023 (Persen)

Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	5,3	5,3 – 5,5	6,2– 6,5	5,3-5,7	5,3-5,7
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	5,3-5,4	5,9-6,1	5,3-5,5	2,9-2,9
Konsumsi Pemerintah	(4,5)	0,9-1,4	5,1-5,3	2,5-3,2	0,2-0,2
Investasi (PMTB)	3,9	6,1-6,3	8,0-8,4	6,2-7,0	2,0-2,2
Ekspor Barang dan Jasa	16,3	6,0-7,1	5,8-6,2	7,2-7,9	1,8-2,0
Impor Barang dan jasa	14,7	6,7-7,6	5,1-5,2	7,2-8,0	1,5-1,7

Sumber : 1) BPS, 2022; 2) RPJMN 2020-2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas

3.1.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) 4,82 persen. Sebanyak 16 Kategori Lapangan Usaha tumbuh positif dan hanya satu kategori yang tumbuh negatif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar -3,72 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya sebesar 18,30 persen. Selanjutnya kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,82 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,37 persen; posisi keempat Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,37 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi ke lima tumbuh sebesar 8,61 persen. Momentum Ramadhan dan pemberian Tunjangan Hari Raya mendorong ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I-2024 dibanding Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar -4,63 persen (q to q). Kategori Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar -23,23 persen. Kemudian kategori Jasa Perusahaan turun sebesar -13,69 persen. Hal ini disebabkan Proyek pemerintah pola yang sama terjadi di setiap tahun dimana realisasi pada triwulan I sedikit dibandingkan triwulan lainnya.

Pertumbuhan positif terjadi pada 6 kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,81 persen; disusul oleh Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan



Daur Ulang sebesar 5,55 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I-2024 dibanding Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar -4,63 persen (q to q). Kategori Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar -23,23 persen. Kemudian kategori Jasa Perusahaan turun sebesar -13,69 persen. Hal ini disebabkan Proyek pemerintah pola yang sama terjadi di setiap tahun dimana realisasi pada triwulan I sedikit dibandingkan triwulan lainnya.

Pertumbuhan positif terjadi pada 6 kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,81 persen; disusul oleh Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,55 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,20 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,68 persen; Industri Pengolahan sebesar 13,42 persen; Konstruksi sebesar 12,75 persen; dan. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 62,04 persen. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2024 dibandingkan triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar -4,63 persen (q-to-q). Komponen Pengeluaran yang mengalami kontraksi yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -49,73; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -18,80 persen; komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -0,37 persen sedangkan komponen lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 31,47 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,57 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi pengurang dalam perekonomian Sulawesi Selatan mengalami kontraksi sebesar -32,61persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh



komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Selatan yaitu sebesar 58,70 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,92 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 9,25 persen; serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,79 persen. Sementara itu, Komponen yang memiliki peranan yang relatif sangat kecil yaitu Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 2,28 persen dan Komponen Perubahan Inventori yaitu sebesar 0,04 persen-

Tabel 3.4
Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Triwulan I-2023, Triwulan IV-2023 dan Triwulan I-2024 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,54	30,02	34,18	17,63	15,60	16,98
B. Pertambangan dan Penggalian	8,76	8,22	8,05	4,55	5,23	4,88
C. Industri Pengolahan	19,97	21,97	21,62	12,03	13,14	12,64
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,13	0,12	0,10	0,12	0,11
E. Pengadaan Air	0,15	0,15	0,16	0,11	0,11	0,12
F. Konstruksi	20,04	26,79	20,55	10,11	13,45	10,33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,29	25,55	23,66	13,23	15,65	14,37
H. Transportasi dan Pergudangan	6,45	7,79	7,51	3,05	3,34	3,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	2,06	2,39	2,29	1,30	1,50	1,42
J. Informasi dan Komunikasi	8,31	9,03	8,99	7,39	7,97	7,93
K. Jasa Keuangan	5,69	5,76	6,12	2,98	3,01	3,17
L. Real Estate	5,51	5,84	5,95	3,21	3,39	3,40
M, N. Jasa Perusahaan	0,71	0,89	0,78	0,40	0,50	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	5,76	6,36	6,87	3,48	3,83	4,00
P. Jasa Pendidikan	7,24	8,49	7,99	4,95	5,62	5,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,33	4,28	3,91	2,03	2,59	2,32
R, S, T, U. Jasa Lainnya	2,06	2,45	2,46	1,24	1,46	1,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	152,00	166,12	161,21	87,80	96,51	92,04

Sumber : BPS, 2024



Tabel 3.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2024 terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan	
			Triw I-2024 terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 terhadap Triw I-2023 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,81	-3,72	1,42	-0,75
B. Pertambangan dan Penggalian	-6,58	7,37	-0,36	0,38
C. Industri Pengolahan	-3,80	5,08	-0,52	0,70
D. Pengadaan Listrik, Gas	-9,43	7,21	-0,01	0,01
E. Pengadaan Air	5,55	6,08	0,01	0,01
F. Konstruksi	-23,23	2,14	-3,24	0,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,18	8,61	-1,33	1,30
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,05	4,11	-0,17	0,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,88	9,37	-0,08	0,14
J. Informasi dan Komunikasi	-0,46	7,30	-0,04	0,61
K. Jasa Keuangan	5,35	6,22	0,17	0,21
L. Real Estate	0,34	5,80	0,01	0,21
M, N. Jasa Perusahaan	-13,69	6,43	-0,07	0,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	4,43	14,82	0,18	0,59
P. Jasa Pendidikan	-5,72	7,14	-0,33	0,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-10,42	14,37	-0,28	0,33
R, S, T, U. Jasa Lainnya	0,29	18,30	0,00	0,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-4,63	4,82	-4,63	4,82

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare

Ekonomi Kota Parepare tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha jasa keuangan dan administrasi pemerintahan yang masing-masing kontraksi sebesar -5,16 persen dan -0,84 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada Lima belas kategori pada lapangan usaha. Tiga Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi diatas 7 persen adalah Lapangan Usaha Jasa pendidikan sebesar 8,26 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencapai 7,10 persen.

Struktur PDRB Kota Parepare menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti.



Perekonomian Kota Parepare masih didominasi oleh Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,92 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 15,36 persen; Real estat sebesar 9,23 persen; dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 8,12 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 49,63 persen.

Tabel 3.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2022*	2023**	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	572.87	667.27	326.32	338.31
B. Pertambangan dan Penggalian	22.17	23.64	11.24	11.33
C. Industri Pengolahan	161.17	190.08	118.24	121.04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.72	6.50	5.45	5.75
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.32	26.87	14.56	14.60
F. Konstruksi	1,199.36	1,430.62	728.30	759.04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,250.18	1,575.48	941.08	990.62
H. Transportasi dan Pergudangan	374.34	553.65	309.55	330.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	495.39	622.20	362.35	388.10
J. Informasi dan Komunikasi	365.39	393.78	415.83	435.79
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	690.06	721.60	425.72	403.73
L. Real Estat	785.75	859.88	499.26	522.58
M,N. Jasa Perusahaan	18.55	22.99	13.32	14.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	718.92	756.01	452.03	448.24
P. Jasa Pendidikan	504.76	672.71	378.08	409.29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	436.49	496.81	303.15	315.75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	204.78	291.51	163.96	172.60
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8,697.28	9,311.60	5,468.43	5,680.82

Catatan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, 2024



Tabel 3.7
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
(persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.57	1.51	(0.52)	0.03	3.68
B. Pertambangan dan Penggalian	(0.43)	(1.00)	0.37	0.03	0.84
C. Industri Pengolahan	8.23	(2.01)	7.50	8.33	2.36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.56	2.62	3.94	4.27	5.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.01	3.61	0.78	(0.06)	0.29
F. Konstruksi	7.54	(0.54)	1.76	4.41	4.22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.89	(4.16)	7.52	9.93	5.26
H. Transportasi dan Pergudangan	8.98	(14.79)	7.09	16.93	6.63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.61	(1.02)	5.42	7.37	7.10
J. Informasi dan Komunikasi	6.12	8.22	5.10	1.23	4.80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.03	4.21	5.46	(0.88)	(5.16)
L. Real Estat	3.55	3.94	1.69	1.45	4.67
M,N. Jasa Perusahaan	6.12	(8.61)	3.63	6.59	5.07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.44	(0.50)	6.41	4.14	(0.84)
P. Jasa Pendidikan	5.81	4.82	3.78	8.00	8.26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.77	10.47	6.21	7.69	4.16
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.94	(15.82)	(0.87)	26.67	5.27
Pertumbuhan Ekonomi	6.65	(0.08)	4.41	5.93	3.88

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.2. Inflasi

3.1.1.2.1 Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,84. Inflasi tertinggi terjadi di Kab. Wajo 2,73 persen dengan IHK sebesar 106,34 dan terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 1,77 persen dengan IHK sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,06 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,71 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,4 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,71 persen; kelompok transportasi sebesar 0,9 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan



makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,28 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada Juni 2024 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sulawesi Selatan bulan Juni 2024 sebesar 0,83 persen.

Tabel 3.8
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2023	IHK Desember 2023	IHK Juni 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,73	104,97	105,84	-0,26	0,83	2,03	-0,26	2,03
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,72	107,47	108,97	-0,73	1,40	4,06	-0,23	1,22
Pakaian dan Alas Kaki	102,70	102,95	103,43	0,06	0,47	0,71	~0	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,01	100,80	101,41	0,04	0,61	0,40	0,01	0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,92	102,53	102,73	~0	0,20	0,79	~0	0,05
Kesehatan	101,88	102,10	103,62	-0,18	1,49	1,71	~0	0,03
Transportasi	110,29	111,64	111,28	-0,48	-0,32	0,90	-0,06	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,03	100,12	99,91	-0,07	-0,21	-0,12	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,31	102,21	102,76	0,17	0,54	1,43	~0	0,02
Pendidikan	101,62	103,29	103,43	~0	0,14	1,78	~0	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,68	103,31	103,98	0,09	0,65	1,27	0,01	0,10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,72	104,90	108,16	0,17	3,11	4,28	0,01	0,32

Catatan: ¹⁾Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Mei 2024.
²⁾Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Desember 2023.
³⁾Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Juni 2023.
~0: Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber : BPS, 2024

3.1.2.2 Inflasi Kota Parepare

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Parepare sebesar 2,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,79. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,76 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok kesehatan sebesar 7 persen; kelompok transportasi sebesar 3,71 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar



1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,89 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,93 persen. Sedangkan indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,76 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,7 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Parepare bulan Juni 2024 masing-masing sebesar 0,34 persen dan 1,92 persen.

Tabel 3.9
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2023	IHK Desember 2023	IHK Juni 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	104,04	104,78	106,79	0,34	1,92	2,64	0,34	2,64
Makanan, Minuman, dan Tembakau	105,16	107,16	110,17	0,65	2,81	4,76	0,20	1,47
Pakaian dan Alas Kaki	102,12	102,56	102,86	0,04	0,29	0,72	0,00	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,59	102,57	103,3	0,26	0,71	0,69	0,03	0,08
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,99	101,00	101,21	-0,02	0,21	-0,76	0,00	-0,05
Kesehatan	101,86	101,84	108,99	0,4	7,02	7	0,01	0,16
Transportasi	108,21	109,32	112,23	0,29	2,66	3,71	0,03	0,40
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,27	99,54	99,57	0	0,03	-0,7	0,00	-0,05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,70	102,34	102,89	0	0,54	1,17	0,00	0,02
Pendidikan	107,47	108,02	108,02	0	0	0,51	0,00	0,02
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,49	103,25	105,45	0,62	2,13	2,89	0,07	0,31
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,45	105,39	108,54	-0,06	2,99	2,93	0,00	0,23

Keterangan:
¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Mei 2024.
²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Desember 2023.
³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Juni 2023.

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3.1.1.3.1 TPT Sulawesi Selatan

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 4.707,98 ribu orang, naik 152,54 ribu orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,04 persen poin



dibanding Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.477,30 ribu orang, naik sebanyak 161.45 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 69,76 ribu orang. Sebanyak 1.833,09 ribu orang (40,94 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,29 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 3,54 persen poin, sementara setengah pengangguran naik sebesar 1,21 persen poin dibanding Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,90 persen, turun sebesar 0,36 persen poin dibanding Februari 2023.

Tabel 3.10
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022–Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022–Feb 2023		Perubahan Feb 2023–Feb 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	6.973,64	7.076,67	7.197,87	103,03	1,48	121,20	1,71
Angkatan Kerja	4.592,33	4.555,44	4.707,98	-36,89	-0,80	152,54	3,35
- Bekerja	4.328,12	4.315,85	4.477,30	-12,27	-0,28	161,45	3,74
- Pengangguran	264,21	239,59	230,67	-24,62	-9,32	-8,92	-3,72
Bukan Angkatan Kerja	2.381,31	2.521,23	2.489,89	139,92	5,88	-31,34	-1,24
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,85	64,37	65,41	-1,48		1,04	
- Laki-Laki	82,73	82,30	81,44	-0,43		-0,86	
- Perempuan	49,54	47,02	49,87	-2,52		2,85	

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.3.2 TPT Kota Parepare

Jumlah Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun ke atas) Agustus 2023 mencapai 117.578 orang, meningkat sebanyak 4.514 orang dibanding Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 77.036 orang, meningkat sekitar 7,10 persen dibanding Agustus 2022.



Sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang meingkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 1,90 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,86 persen, naik 0,26 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. TPT laki-laki sebesar 5,91 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan. Penduduk yang bekerja sebanyak 72.522orang, mengalami peningkatan sebanyak 4.618 orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor jasa dengan persentase mencapai 78,34 persen. Sementara sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 4,59 persen.

Tabel 3.11
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2021-Ags 2022		Perubahan Ags 2022-Ags2023	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	111.748	113.064	117.578	1.316	1,18	4514	3,99
Angkatan Kerja	74.806	71.929	77.036	-2.877	-3,85	5107	7,10
- Bekerja	69.777	67.904	72.522	-1.873	-2,68	4618	6,80
- Pengangguran	5.029	4.025	4.514	-1.004	-19,96	489	12,15
Bukan Angkatan Kerja	36.942	41.135	40.542	4.193	11,35	-593	-1,44
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,94	63,62	65,52	-3,32		1,90	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,72	5,60	5,86	-1,13		0,26	

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.4. Tingkat Kemiskinan

3.1.1.4.1 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 8,06 persen, turun 0,64 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk



miskin pada Maret 2024 sebesar 736,48 ribu orang, turun 52,4 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 5,01 persen, naik menjadi 5,08 persen pada Maret 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 11,91 persen, turun menjadi 10,74 persen pada Maret 2024. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan naik sebanyak 8,2 ribu orang (dari 211,48 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 219,65 ribu orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 60,5 ribu orang (dari 577,37 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 516,83 ribu orang pada Maret 2024).

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 459.226,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 342.934,- (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 116.292,- (25,32 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.489.005,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 3.12
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022-
Maret 2024**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	208,53	5,07
Maret 2023	211,48	5,01
Maret 2024	219,65	5,08
Perdesaan		
Maret 2022	568,91	11,63
Maret 2023	577,37	11,91
Maret 2024	516,83	10,74
Total		
Maret 2022	777,44	8,63
Maret 2023	788,85	8,70
Maret 2024	736,48	8,06

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, Maret 2023, dan Maret 2024

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.4.2 Tingkat Kemiskinan Kota Parepare

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 5,34 persen, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan kondisi



Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sekitar 7,98 ribu jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2023 sebesar 0,58, mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin dibandingkan Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2023 sebesar 0,12, mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan Maret 2022. Garis Kemiskinan Maret 2023 sebesar Rp 445.032,- per kapita/bulan, mengalami kenaikan sebesar Rp 42.906,- per kapita/bulan dibandingkan Maret 2022.

Tabel 3.13
Perbandingan Angka Kemiskinan Parepare dan Sulawesi Selatan, Maret 2023

Tahun	Parepare	Sulawesi Selatan
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,34	8,70
Indeks P1	0,58	1,57
Indeks P2	0,12	0,41
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	445.032	436.025

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Sumber : BPS, 2024

3.1.1.5 Rasio Gini

3.1.1.5.1 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Sulawesi Selatan

Tingkat kemampuan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,373 turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,386 dan juga mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,325 turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,339 dan juga turun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,33 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat kemampuan rendah. Jika dirinci menurut wilayah,



di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,92 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,74 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

3.1.1.5.2 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Kota Parepare

Indeks Gini di Kota Parepare yaitu 0,379 di tahun 2022. Hal ini berarti Koefisien gini yang mendekati angka 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik, hingga jika mencapai angka 0 ini berarti pemerataan pendapatan sempurna, kemudian jika mencapai angka 0,5 -1 berarti ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Dengan kata lain seluruh pendapatan masyarakat yang ada dikuasai oleh sebagian atau kurang dari setengah masyarakat.

Pada 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Parepare yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,379.

3.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3.1.1.6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,63 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,53 tahun menjadi 13,54 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 8,63 tahun menjadi 8,76 tahun pada 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 411 ribu rupiah (3,60 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.



3.1.1.6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare

Capaian IPM tahun 2023 yang meningkat 0,49 poin didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Capaian IPM Tahun 2023 lebih cepat dari tahun sebelumnya sebesar 0,33 poin di tahun 2022. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi pengetahuan, pada tahun 2023 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,54 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma III. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 14,52 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,04 tahun, dari 10,66 tahun menjadi 10,70 tahun pada tahun 2023. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,78 tahun, lebih lama 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Standar hidup layak juga menjadi lebih baik yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) masyarakat Parepare sebesar 3,34 persen dibandingkan tahun 2022 atau meningkat 468 ribu rupiah.

3.1.1.7 Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Parepare saat ini dalam kondisi baik, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88 persen tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare kedepan akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang mulai bergairah kembali dengan layanan investasi yang semakin baik dan mudah. Lapangan usaha yang berkontribusi besar adalah perdagangan besar dan eceran, real estate, konstruksi dan belanja administrasi pemerintah. Dengan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang semakin baik, maka inflasi daerah diperkirakan tetap terkendali pada angka 3,0%. Namun, hal ini akan berubah jika rantai distribusi barang dan jasa mengalami kendala pada sektor transportasi ataupun gangguan produksi akibat perubahan iklim.



Perbaikan kondisi ketenagakerjaan saat ini menunjukkan tren yang baik, dimana angka pengangguran juga pada tahun 2023 adalah 5,86 %. Tren ini diperkirakan juga masih terus terjadi di tahun 2024 dengan TPT sebesar 4,92 %. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk dapat menyerap Kembali tenaga kerja yang mengalami PHK pada saat ini dan tenaga kerja yang baru memasuki dunia kerja. Namun demikian, Kota Parepare saat ini merupakan daerah tujuan pencari kerja sehingga persaingan dalam dunia kerja cukup tinggi. Olehnya itu, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya harus mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja local agar sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga semakin banya tenaga kerja local yang mengisi lowongan kerja yang ada.

Penurunan tingkat kemiskinan juga diperkirakan terjadi di tahun 2024, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali maka diharapkan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kehidupan mereka semakin Sejahtera.

3.1.1.8 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare saat ini dalam kondisi baik. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian daerah, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dapat mencapai 6,00 persen melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang sesuai kebutuhan pasar. Demikian pula indikator makro lainnya akan mengalami perbaikan sebagai imbas dari membaiknya perekonomian daerah.

Tabel 3.14
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Kota Parepare Tahun 2024

Uraian	Target RPD	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	6,50	6,50
Tingkat Kemiskinan (%)	5,18	5,18	5,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,92	4,92	4,92
Indeks Gini (Gini Ratio)	0,332	0,332	0,332
Inflasi (%)	3,0	3,0	3,0
Indeks Pembangunan Manusia	79,43	79,43	79,43

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024



Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Olehnya itu, keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui kemampuan keuangan yang dimiliki, maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Secara regulasi, rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi kepentingan lokal, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya Perda ini meratifikasi secara *mutatis mutandis* PP Nomor 12 Tahun 2019, namun terdapat beberapa detail yang pada intinya menyesuaikan kepentingan daerah tanpa melanggar ketentuan regulatif peraturan di atasnya.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Parepare untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.



Untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan peraturan ini pada saat penyusunan RKPD Kota Parepare Tahun 2022, sehingga struktur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan capaian realisasi dan kondisis yang berkembang dalam semester pertama tahun berjalan, Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalami penyesuaian dengan berbagai perubahan asumsi dari Anggaran Pendapatan pada APBD murni yang telah ditetapkan sehingga dengan penyesuaian dan perubahan tersebut diharapkan realisasi pendapatan dapat lebih optimal.

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Parepare terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Parepare Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak



- alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat termasuk dalam hal peningkatan kompetensi pemungut pajak dan retribusi;
- c. Penyesuaian target Pendapatan Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
 - d. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

3.2.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.336.414.319.314, namun pada perubahan RKPD Tahun 2024 berkurang sebesar Rp. 335.851.188.170 atau 25,13% menjadi hanya Rp. 1.000.563.131.144

3.2.1.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare sebelum Perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 216.761.334.342, namun setelah perubahan menjadi Rp. 232.769.096.786, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.007.762.444 atau 7,38%. PAD terdiri dari :

- i Pajak Daerah, sebelum perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 48.320.400.000, namun dalam Perubahan RKPD ditargetkan Rp. 49.858.470.000 atau bertambah 3,18% yang setara dengan Rp. 1.538.070.000;
- ii Retribusi Daerah sebelum perubahan RKPD 2024 ditargetkan sebesar 10.940.934.342 mengalami perubahan pada angka Rp. 9.536.217.552;
- iii Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 12.500.000.000, namun berkurang menjadi Rp. 11.450.000.000 pada perubahan RKPD; dan



- iv Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 145.000.000.000 pada RKPD Tahun 2024, namun setelah perubahan menjadi Rp. 161.924.409.234, yang berarti bertambah Rp. 16.924.409.234 atau 11,67%.

3.2.1.3 Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 1.116.652.984.972, namun mengalami pengurangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi hanya Rp. 767.794.034.358, yang berarti berkurang Rp. 348.858.950.614 atau berkurang 31,24% Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD terdiri dari :

- i Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 1.043.771.834.972, namun proyeksi ini mengalami pengurangan dalam Perubahan RKPD menjadi hanya Rp. 767.794.034.358 atau berkurang 31,24% yang setara dengan Rp. 348.858.950.614.
- ii Transfer Antar Daerah diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 72.881.150.000, namun dalam Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp. 137.807.053.764 atau naik 89,08% atau Rp. 64.925.903.764.

3.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 3.000.000.000 pada RKPD Tahun 2024, namun dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan nihil, yang bersumber dari pendapatan Hibah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah pada semester I Tahun 2024, maka Perubahan Pendapatan Daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.15
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target APBD Pokok 2024 (Rp)	Target RKPD Tahun 2024 (Rp)	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah / (Berkurang)	Persen
1	Pendapatan Daerah	930.783.184.333	1.336.414.319.314	983.579.131.144	(352.835.188.170)	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	203.995.332.669	216.761.334.342	209.332.411.591	(7.428.922.751)	
1.1.1	Pajak daerah	43.735.500.000	48.320.400.000	44,983,874,333	(3,336,525,667.00)	(6.91)
1.1.2	Retribusi daerah	8.220.877.200	10.940.934.342	8,508,607,902	(2,432,326,440.00)	(22.23)
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	10.000.000.000	12.500.000.000	10,250,000,000	(2,250,000,000.00)	(18.00)
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	142.038.955.469	145.000.000.000	145,589,929,355	589,929,355.00	0.41
1.2	Pendapatan Transfer		1.116.652.984.972	774.246.719.552	(342.406.265.420)	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	726.787.851.664	1.043.771.834.972	654.365.569.552	(389,406,265,420.00)	(37.31)
1.2.1.1	Dana Perimbangan		1.018.771.834.972	629.365.569.552	(389,406,265,420.00)	(38.22)
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum		478.537.533.700			
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		17.164.615.500	14.267.235.807	(2,897,379,693.00)	(16.88)
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum		461.372.918.200	485.730.807.450	24,357,889,250.00	5.28
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus		540.234.301.272			
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik		269.500.377.272	40.040.686.890	(229,459,690,382.00)	(85.14)
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik		270.733.924.000	89.326.839.375	(181,407,084,625.00)	(67.01)
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah		25.000.000.000	25.000.000.000	-	0.00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	119.832.220.664	72.881.150.000	119.881.150.000	47.000.000.000	64,49
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	111.951.070.664	65.000.000.000	112.000.000.000	47.000.000.000	72,31
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	7.881.150.000	7.881.150.000	7.881.150.000	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi			-		

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Uraian	Target APBD Pokok 2024 (Rp)	Target RKPD Tahun 2024 (Rp)	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah / (Berkurang)	Persen
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Daerah Kab/kota		-	-		
1,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	-100,00%
1.3.1	Hibah		3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	-100,00%
1.3.2	Dana darurat		-			
1.3.3	Lain-lain Pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-			

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024 (data diolah)



3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

3.2.2.2 Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota, Wakil Walikota,



Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.3 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3.2.2.4 Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.2.5 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.2.6 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk



menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.2.7 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta



- dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.8 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.9 Belanja Transfer

Jenis belanja ini terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



Tabel 3.16
Target Perubahan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2024

No	Uraian	Target RPD Tahun 2024 (Rp)	Target APBD Pokok 2024 (Rp)	Target RKPD Tahun 2024 (Rp)	Target Perubahan RKPD Tahun 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Persen
2	BELANJA DAERAH	926.260.000.000	947.767.184.333	1.353.398.319.314	1.000.563.131.144	(352.835.188.170)	(26,07)
2.1	Belanja Operasi	766.500.000.000	862.224.312.198	1.035.403.595.450	917.307.686.680	(118.095.908.770)	(11,41)
2.1.1	Belanja Pegawai	370.000.000.000	410.304.505.563	406.918.250.178	424.665.163.257	17.746.913.079	4.36
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.000.000.000	423.322.296.414	591.385.345.272	454.667.952.144	(136,717,393,128)	(23.12)
2.1.3	Belanja Bunga	1.500.000.000	1,000,000,000	1.500.000.000	1.260.000.000	(240,000,000)	(16.00)
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	7.500.000.000	27.597.510.221	35.000.000.000	30.000.000.000	(5,000,000,000)	(14.29)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	600.000.000	-	(600,000,000)	(100.00)
2.2	Belanja Modal	153,76	78.542.872.135	307.994.723.864	82.470.015.741	(225.524.708.123)	(73,22)
2.3	Belanja Tidak Terduga	6,00	7.000.000.0000	10.000.000.000	7.500.000.000	(2.500.000.000)	(25,00)
2.4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024 (data diolah)



3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman dan (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Pembentukan dana cadangan, (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, (3) Pembayaran pokok utang dan (4) Pemberian pinjaman. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran.

3.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan, antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebagai sumber penerimaan APBD Tahun 2024, yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
2. SiLPA diupayakan semakin menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada Bank Sulselbar serta pembayaran pokok utang.

Selengkapnya Target Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



Tabel 3.17
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2024

No	Uraian	Target RPD Tahun 2024 (Rp)	Target APBD Pokok 2024 (Rp)	Target RKPD Tahun 2024 (Rp)	Target Perubahan RKPD Tahun 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Persen
3	PEMBIAYAAN DAERAH	8.020.000.000	16.984.000.000	16.984.000.000	16.984.000.000	-	-
3,1	Penerimaan pembiayaan	-	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	-	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3,2	Pengeluaran pembiayaan	8.020.000.000	8.516.000.000	8.016.000.000	8.516.000.000	-	-
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.770.000.000	3.266.000.000	2.766.000.000	3.266.000.000	-	-
3.2.2.	Penyertaan modal daerah	5.250.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	-	-
3.2.3	Pembentuykan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3,3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran berkenan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024



BAB IV

Pemerintah Kota Parepare

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2023. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 dan hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya juga menjadi acuan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 serta dengan memperhatikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi solusi terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi serta dapat bersinergi dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan provinsi.

Mengingat bahwa RPD tidak memuat visi dan misi maka Dokumen RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026, berfokus pada Tujuan dan sasaran strategis daerah beserta indikator dan target kinerjanya. Hal ini telah selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru, yang menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap keempat, dan/atau isu strategi aktual.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan dalam RPD merupakan suatu kondisi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Parepare bersama masyarakatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2024-2026. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian program-program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh



berbagai perangkat daerah secara terintegrasi dan holistik. Sasaran pembangunan merupakan penjabaran atau hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan secara rasional dapat dicapai diakhir periode perencanaan.

Penyusunan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan langkah strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, termasuk kinerja perangkat daerah. Pada periode penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode transisi ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD harus mempertimbangkan visi misi RPJPD tahun 2005-2025, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta isu strategis aktual.

Selain itu, permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi dari hasil evaluasi RPJMD tahun 2018-2024 juga menjadi perhatian dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam RKPD ini. Tujuan dan sasaran juga perlu dilengkapi dengan indikator dan target kinerja agar dapat diukur sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut telah tercapai. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka tujuan dan sasaran strategis Kota Parepare Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan I : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
 - b. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG);



2. Tujuan II : Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - c. Meningkatnya Produktivitas daerah;
 - d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
 - e. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;
 - f. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah;
3. Tujuan III : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani, dengan sasaran sebagai berikut :
 - g. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai, maka rumusan strategi pembangunan daerah Kota Parepare dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif.
4. Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar.
5. Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana antar daerah dan lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.



7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik.
8. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Parepare
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat
		Meningkatnya Pengurusutamaan Gender (PUG)	Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya produktivitas daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar
		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja
		Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			(early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik
		Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan.

Sumber : RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Parepare untuk tahun 2024-2026, yang dirinci menurut strategi yang telah ditetapkan sebagai rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengatasi isu strategis daerah dan isu perangkat daerah secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi pembangunan. Dalam penyusunan RPD telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menetapkan strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Adapun arah kebijakan RPD Kota Parepare tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan Kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.	<p>Peningkatan pemerataan distribusi prasarana dan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.</p> <p>Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan jaminan kesehatan</p>



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga.
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender	Penguatan kapasitas SDM dan kualitas hidup serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya produktivitas daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif.	Mengoptimalkan daya dukung infrastruktur perekonomian daerah, perbaikan ekosistem pendukung UMKM, investasi dan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran DTKS sebagai basis penerima sasaran program perlindungan sosial. 2. Stabilisasi harga kebutuhan pokok. 3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan 4. Penguatan akses layanan dasar
		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan memperluas kesempatan kerja di sector informal
		Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana	Penguatan kolaborasi stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana alam
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik	Peningkatan kualitas layanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik serta pengembangann inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat fungsional/ substansif serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh pengawasan yang andal, efektif dan efisien



NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya	

Sumber : RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka setiap tujuan dan sasaran tersebut telah mempunyai indikator dan target kinerja sebagai alat ukurnya. Target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET RKPD 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	
Tujuan I	Meningkatkan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia		79,43	79,43
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pendidikan		76,83	76,83
			Indeks Kesehatan		80,12	80,12
			Pengeluaran per kapita		14,450	14,450
	Sasaran 2	Meningkatnya Pengaurusuta maan Gender (PUG)	Indeks Pemberdayaan Gender		79,13	79,13
Tujuan II	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat		PDRB Per kapita	Juta Rp	60,99	60,99
			Indeks Gini (Gini ratio)		0,332	0,332
			Inflasi	Persen	3,0	3,0
	Sasara 3	Meningkatnya produktivitas daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,50	6,50
	Sasaran 4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,18	5,18
	Sasaran 5	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran	Persen	4,92	4,92
	Sasaran 6	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		77,72	77,72
			Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		0,53	0,53



TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET RKPD 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	
Tujuan III	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani		Indeks Reformasi Birokrasi		67,00 (CC)	67,00 (CC)
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,50	4,50
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		78,00	78,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat		84,63	84,63
			Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		3,0 (Baik)	3,0 (Baik)
	Sasaran 8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP		65,04 (B)	65,04 (B)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		68,60	68,60

Sumber : RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Parepare Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi serta hasil evaluasi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang dikaitkan dengan isu strategis yang terdapat dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026. Mengingat bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka pembangunan daerah harus berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Olehnya itu, prioritas pembangunan Kota Parepare juga telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan nasional tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Olehnya itu, RKP Tahun 2024 merupakan



implemnetasi dari prioritas pembangunan dalam RPJMN dan menjadi acuan bagi provinsi dan kab/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan pembangunan tahun 2023, forum konsultasi public, kerangka ekonomi makro, dinamika pandemi Covid-19 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

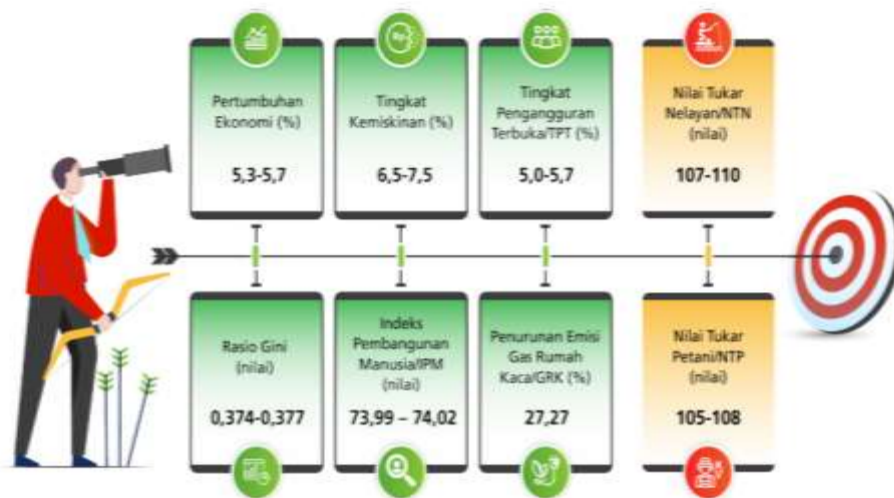
1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;



2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4.2
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.



Gambar 4.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan



4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan

sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

Gambar 4.4
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing PN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. Pada sub bab ini dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan prioritas terkait untuk tiap PN. Kerangka implementasi meliputi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung pelaksanaan PN, yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan.

1. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian,



perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.

2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.5. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

- (1) KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budi daya. Perikanan budi daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, kepiting, udang, ikan air laut, serta sarana produksi usaha dan pembenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada

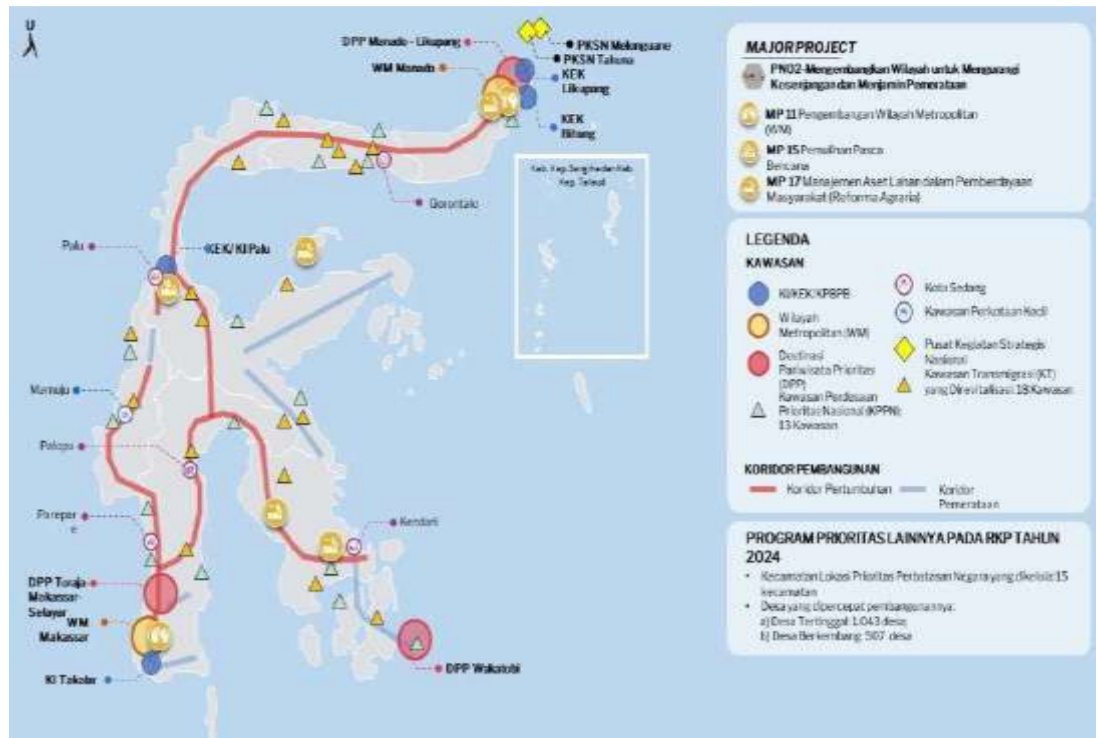


pengembangan WM Makassar; kota sedang (Parepare, Palopo);

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri, serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya.; (b) pembangunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), termasuk KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi termasuk kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; (e) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (f) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota,

serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan



sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional.



Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada Rancangan RKP tahun 2024 sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024, yaitu “**Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan yang Inklusif**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA);
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTRUKTUR);
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI);
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI);
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP);
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

4.2.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel 4.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu straregis terhadap prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan/sasaran dan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 4.6, yang menggambarkan arah kebijakan RPD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel 4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKP 2024
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	66,16 (2022)	67,31 (B)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka		68,52 (B)	
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/angka		A- (4,01 - 4,50)	
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson	Angka		0,67	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka		81,97	
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp/-Angkatan Kerja		84.248.042,86	
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,23-6,71	5,5-6,9



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Target RKP 2024	
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta		70,7	
			9	Gini Rasio	%	0,387	0,361	
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,51%	4,24	3,59-4,30
		Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan	Angka	8,70%	8,31	6,7 -7,7
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM	Angka	74,60	73,99	74,02
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,14 (2022)	93,65	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH	poin	74,17 (2022)	73,57	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq		1.823.583	



Tabel 4.5

Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
				Optimalnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
2	Belum optimalnya upaya peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson
				Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur



No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
3	Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah
				Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi
4	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Angka kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB
					Gini Rasio
				Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka
			Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	



No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
				Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	IPM
				Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Kualitas Lingkungan Hidup belum optimal	Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (7)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
				Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)

Sumber : RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024



Tabel 4.6. Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
	Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	9	Gini Rasio
		Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	10	Tingkat Pengangguran terbuka
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	11	Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	12	IPM
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)



4.2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

4.2.2.3.1 Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 202. Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memmanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memmanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan; Mengubah sistem, pola pikir dan budaya



kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan;** Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
4. **Penataan Tata Laksana;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
5. **Penataan Sumber Daya Manusia;** Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan
6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja;** Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7. **Penguatan Pengawasan;** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;** Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

Strategi peningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terwujud pada Nilai SAKIP Provinsi yaitu Nilai A dengan rentang nilai 81 sampai dengan 90 dan berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terwujud pada Nilai Indeks Pelayanan Publik yaitu Nilai A dengan nilai 4,51 – 5,0. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. Peningkatan persentase berkinerja baik dan sangat baik;
- c. Penataan dan penguatan kelembagaan;
- d. Peningkatan Nilai SAKIP OPD;
- e. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah;
- f. Peningkatan upaya penataan peraturan perundang-undangan;



- g. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- h. Implementasi e-governmentt.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkannya antara lain:

- a. Pengembangan inovasi daerah.
- b. Pengelolaan informasi publik.
- c. Penataan organisasi.

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat inter-konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan



- b. Membangun konektivitas antar wilayah dengan mengoptimalkan peningkatan peran pelabuhan, khususnya pelabuhan pengumpan regional;
- c. Mengoptimalkan aksesibilitas pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan melakukan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan;
- d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
- e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan;
- f. Pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas, khususnya akses air minum dan akses sanitasi aman dan layak serta jalan lingkungan pada kawasan permukiman khususnya pada daerah rawan air, serta wilayah pesisir, dan kepulauan; dan
- g. Pembangunan system penyediaan air minum regional.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah



(PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jenepono, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.

Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan



potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;

- b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

4. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara



- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
- c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
- d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
- f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
- g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi



kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi

- h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;

Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;

6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan



pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui
- d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
 - a. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam



masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

- e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;
- f. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung *link and match* antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
- g. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

7. **Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;**

Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana prasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan



modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

- a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.
- e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;

8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan



perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:

- a. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
- b. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- f. Penciptaan lingkungan ramah anak

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada:

- a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan desa melalui perbaikan tata kelola;
- b. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;
- d. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan



penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan;

- e. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),

Meningkatkan layanan disabilitas difokuskan pada:

- a. Penguatan layanan terhadap penyandang disabilitas ;
- b. Peningkatan sarana prasarana kebutuhan disabilitas;
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan; dan
- e. Penciptaan lingkungan ramah disabilitas

9. Penguatan Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

- a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai



upaya untuk membangun hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

- b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diharapkan tumbuh secara inklusif, efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika



kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industri sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran visi/misi gubernur melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui program peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan



guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan. Melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya guna meningkatkan produksi dan program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan antara lain : rumput laut, karaginan, gurita, udang vanamae, tuna.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat penelitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Disamping itu peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; Percepatan pembangunan infrastruktur, amenities dan atraksi di destinasi Pariwisata dengan dukungan investasi, *event*, dan *meeting, incentive, conference and exhibition*; (g) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (h) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) peningkatan investasi utamanya di kawasan industri, serta yang berorientasi ekspor dan hijau; (b) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (c) fasilitasi kemudahan investasi hijau

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap



pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pesisir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
- c. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

Secara ringkas strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.7 Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	<p>Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan Sumber Daya Manusia; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Penguatan Pengawasan;. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; <p>Untuk meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. b. Penataan dan penguatan kelembagaan. c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. e. Implementasi e-government.</p> <p>Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:</p> <p>a. Pengembangan inovasi daerah. b. Pengelolaan informasi publik. c. Penataan organisasi</p>
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	<p>Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:</p> <p>a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan; b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;</p> <p>d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;</p> <p>e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan.</p> <p>f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.</p>
3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	1. Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan.



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan strategi pada fokus inklusif meliputi (1) memelihara dan meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis serta perhutanan sosial; (2) menyelamatkan DAS dalam rangka mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata; (3) meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi; dan (4) menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi secara partisipatif dan melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas/ketahanan air juga diarahkan pada fokus berkelanjutan melalui berbagai strategi antara lain (1) melindungi dan mempertahankan luas minimal kawasan berfungsi lindung dan pengelolaan hutan berkelanjutan; (2) memelihara daerah</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>tangkapan air dan ekosistemnya; (3) akselerasi penyelesaian pembangunan waduk multiguna dan pemanfaatannya; (4) penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan kegiatan perekonomian; serta (5) memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air terpadu dari hulu ke hilir</p>
4	<p>Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata</p>	<p>Peningkatan pembangunan, Pemerataan Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah</p>	<p>a. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1) akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan tenaga kerja berkompentensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan; (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal, (5) percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; (8) penguatan industri kreatif berbasis konten; (9) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri; (10) penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah; (11) peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; dan (12) penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan perlindungan pekerja.</p> <p>b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil dengan pusat pertumbuhan;</p> <p>c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;</p>
		<p>Menurunkan kemiskinan</p>	<p>mengentaskan kemiskinan, dengan fokus pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, melalui (a) peningkatan keperantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan; (b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial; dan (c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan. Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi</p>
		<p>Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja</p>	<p>(1) akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan tenaga kerja berkompentensi tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal, (5) percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur;; (8) penguatan industri kreatif berbasis konten; (9) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri; (10) dukungan penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah; (11) peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; dan (12) penegakan pelaksanaan peraturan</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan perlindungan pekerja
		Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;	<p>Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan fokus antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan (i) penerapan kurikulum, model pembelajaran, sumber belajar, pengembangan inovasi pembelajaran dan praktik belajar-mengajar yang merujuk pada paradigma pembelajaran abad ke-21 untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi/higher order thinking skills (HOTS); (ii) peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk peran pendidik dalam penilaian pembelajaran; (iii) pemanfaatan penilaian hasil belajar sebagai basis perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang; (iv) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; (v) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran; (vi) penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter; (vii) peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan; (viii) kesentosaan siswa (student well-being); serta (viii) kesehatan mental dalam pendidikan;



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan (i) meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (ii) perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; (iii) penyaluran bantuan pendidikan bagi anak keluarga rentan dan berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi; (iv) penguatan upaya pencegahan kasus anak putus sekolah termasuk strategi pendataan, upaya penjangkauan dan pendampingan, dan sinkronisasi lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);</p> <p>3. kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah dengan (i) penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) serta (ii) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini; dan (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>kependidikan yang merata, dengan (i) percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (ii) peningkatan kualifikasi guru dan dosen; (iii) penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan; (iv) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja; dan (v) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, mencakup (i) peningkatan kualitas program-program pada peta mutu pendidikan sebagai basis perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan pendidikan hingga pada satuan pendidikan; (ii) penguatan dan akselerasi kapasitas dan mutu akreditasi satuan pendidikan dan program studi; (iii) penguatan Standar Nasional Pendidikan; (iv) penguatan budaya mutu dan kualitas kepemimpinan di sekolah, serta (v) penguatan unit penjaminan mutu di daerah dan satuan pendidikan;</p>
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus antara lain:



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>5. peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, melalui (i) penguatan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal terencana dan terstandar dengan peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); (ii) afirmasi Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) untuk penjangkauan ibu dan anak berisiko; (iii) pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pra nikah, masa hamil, pasca melahirkan, dan lansia; (iv) KB pasca persalinan; dan (v) peningkatan kapasitas kader;</p> <p>6. percepatan penurunan stunting dan wasting melalui (i) peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan peningkatan akses pangan yang aman dan bergizi; serta (ii) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman, peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader, serta integrasi data sasaran dan penguatan</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).</p> <p>7. pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama pada HIV/AIDS, tuberculosis (TB), Malaria, Kusta, dan Schistosomiasis, melalui (i) peningkatan penemuan kasus aktif secara massal dengan peningkatan peran masyarakat dan kemampuan tenaga kesehatan terlatih; (ii) pemberian pengobatan untuk pencegahan; (iii) pemenuhan pemberian obat sampai tuntas, (iv) dukungan sarana penanggulangan penyakit; (v) perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan pengembangan sistem registrasi dan pengingat nasional; (vi) peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular; (vii) penguatan konseling upaya berhenti merokok; serta (viii) pelaksanaan surveilans penyakit terintegrasi dan real time;</p> <p>8. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik FKTP pemerintah maupun swasta serta akreditasi Rumah Sakit, melalui (i) optimalisasi dukungan penggunaan dana alokasi khusus untuk akreditasi FKTP; (ii) peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam akreditasi fasilitas kesehatan; (iii)</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>peningkatan kapasitas tata kelola dan tenaga kesehatan di puskesmas untuk penyiapan akreditasi; dan (iv) pendampingan pada FKTP terutama pada FKTP dengan pemenuhan sarana prasarana yang kurang;</p> <p>9. pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di puskesmas, di antaranya melalui (i) peningkatan kualitas dan kapasitas produksi tenaga kesehatan, (ii) pemberian bantuan biaya pendidikan dengan skema wajib penempatan, dan (iii) afirmasi pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan kepulauan; serta</p> <p>10. pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui (i) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (ii) pengembangan jejaring RS Layanan Unggulan di setiap provinsi; (iii) peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat setara BSL-2 dan laboratorium pengujian obat dan makanan; (iv) penguatan ketahanan kesehatan; (v) digitalisasi pelayanan kesehatan; (vi) penguatan pengawasan obat dan makanan; serta (vii) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
		<p>Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat</p>	<p>Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan</p>
		<p>Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan</p>	<p>Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; b. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak; c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif; d. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan f. Penciptaan lingkungan ramah anak <p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah, dan desa melalui perbaikan tata kelola; b. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi; c. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah; d. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			<p>pengecahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan;</p> <p>e. Penguatan tata kelola layanan melalui peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),</p>
		<p>Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam</p>	<p>Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
5	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	<p>Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.</p> <p>Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan



4.2.2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPD terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan arah Kebijakan RPD
Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengat serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
		Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

Sumber : RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024

Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 menjadi acuan secara operasional yang dilaksanakan oleh para perangkat daerah. Secara lengkap penjelasan tersebut sebagaimana dilihat pada tabel 4.9 berikut :



Tabel 4.9
Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. • Membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. • Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi, dan penyediaan sarana prasarana inovasi. <p>Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten/kota di Sulawesi selatan. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b) inovasi pelayanan publik; dan/atau (c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah yang terdiri dari peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan peningkatan ketersediaan ketersediaan pelabuhan pengumpan regional dan peningkatan layanan irigasi. • Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan dengan cara meningkatkan elektrifikasi desa, jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya air	Peningkatan cakupan irigasi kondisi baik, akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman melalui Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah. Pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Penataan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.	Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata pada berbagai media lokal maupun internasional.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Kerja sama antar pelaku wisata dilakukan melalui MOU dengan berbagai pelaku wisata baik domestik maupun internasional
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
			Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce).
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengah serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi	(a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesehatan mental dalam pendidikan; (b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (c) Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			<p>Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru , penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
		<p>Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar</p>	<p>Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat dalam peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.</p>
		<p>Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak</p>	<p>Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat melalui peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan, anak dan disabilitas serta regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, perlindungan dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. Pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga, pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			<p>peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas serta penurunan total fertility rate. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Menurunkan angka total fertility rate</p>
		<p>Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan</p>	<p>Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik</p>
		<p>Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan melalui penguatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stakeholder pembangunan serta pemberian bantuan keuangan pembangunan sektor keagamaan</p>
6	<p>Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas</p>	<p>Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan</p>	<p>Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi,</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			<p>komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.</p>
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan	<p>Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah (1) Meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			<p>permukiman yang layak dan terjangkau, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, (3) Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh serta pengembangan DAK Terintegrasi; (4) Menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah; (5) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan; (6) Meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang didukung implementasi teknologi; (7) Meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan kapasitas SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-revenue water), peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) Memperkuat mekanisme pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan fungsi kelembagaan regulator air minum guna meningkatkan kualitas</p>



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Penjelasan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
			perencanaan air minum yang terintegrasi; dan (9) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya
		Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon	Arah kebijakan untuk membangun lingkungan hidup melalui peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Parepare dirumuskan sebagai upaya untuk memberikan solusi bagi permasalahan pembangunan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah. Olehnya itu, RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026.

4.2.3.1. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penetapan tema pembangunan setiap tahunnya merupakan hal yang penting karena memberikan gambaran tentang gagasan pokok pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan berdasarkan kondisi strategis yang dihadapi. Dari tema ini akan dirumuskan berbagai prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 akan lebih difokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan hal



tersebut, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024, adalah :

“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Manusia yang Berkualitas, dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”

Pemilihan tema ini telah selaras dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Tema RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD Kota Parepare Tahun 2024

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi Sulsel	Tema RKPD Kota Parepare
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan yang Inklusif	Akselerasi Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Manusia yang Berkualitas, dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024, RKPD Prov. Sulsel 2024, dan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Memperhatikan tema pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya dan arahan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu :

- 1) Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas;
- 2) Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM;
- 3) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkotaan;
- 4) Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja;
- 5) Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;



- 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
- 7) Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi;
- 8) Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Parepare dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11.

Prioritas Pembangunan Kota Parepare dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kota Parepare
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata	Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
			Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas
			Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan rencana dan perubahan iklim	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kota Parepare
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi
			Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024, RKPD Prov. Sulsel 2024, dan Perubahan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

4.2.3.3. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024 telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.9 sedangkan keterkaitan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dengan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :



Tabel 4.12

Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Target P-RKPD 2024
						RKPD	RPD		
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia		79,03	79,43	79,43	79,03	79,43
		1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan		76,06	76,83	76,83	76,06	76,83
			Indeks Kesehatan		79,66	80,12	80,12	79,66	80,12
			Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	14.495	14,450	14,450	14.495	14,450
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	71,85			71,85			
2	Pengembangan Perekonomian Daerah dan Penguatan UMKM	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	PDRB Per kapita	Persen	58,78	60,99	60,99	58,78	60,99
3	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan		Indeks Gini (Gini ratio)	Persen	0,381	0,332	0,332	0,381	0,332
			Inflasi		2,22	3,0	3,0	2,64	3,0
		3. Meningkatnya produktivitas daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,88	6,50	6,50	3,88	6,50



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Target P-RKPD 2024
						RKPD	RPD		
4	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Serta Daya Saing Tenaga Kerja	4. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran	Persen	5,86	4,92	4,92	5,86	4,92
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,34	5,18	5,18	5,34	5,18
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	6. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		71,68	77,72	77,72	71,68	77,72
			Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana			0.53	0.53		0.53
7	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan Inovatif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi		63,93	67,00 (CC)	67,00 (CC)	63,93	67,00 (CC)
8	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,46	4,50	4,50	4,46	4,50
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik			78,00	78,00		78,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat		79,76	84,63	84,63	79,76	84,63



No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Target P-RKPD 2024
						RKPD	RPD		
			Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		2,62 (Baik)	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)	2,62 (Baik)	3,0 (Baik)
		8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP		61,12 (B)	65,04 (B)	65,04 (B)	61,12 (B)	65,04 (B)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		57,9271 (C, Sangat Perlu Perbaikan) *2022	68,60	68,60	57,9271 (C, Sangat Perlu Perbaikan) *2022	68,60

Sumber : RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026



Tabel 4.13

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi	Kota Parepare			
1	Rendahnya Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Standar Pelayanan Minimal	Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas	Peningkatan Promosi dan Layanan Untuk Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
				Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat			Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan
								Indeks Kesehatan
								Pengeluaran Per Kapita
						Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	
2	Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Bonus Demografi	Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	PDRB Per kapita
		Perang Rusia - Ukraina		Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi				Kerjasama Daerah dan Pengembangan Investasi



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		
		Global	Nasional	Provinsi	Kota Parepare					
				(Petik, Olah, Jual)						
				Sulawesi Selatan Sebagai Poros Maritim				Inflasi		
						Meningkatnya produktivitas daerah		Pertumbuhan Ekonomi		
3	Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Bonus Demografi	Pemerataan Pendapatan Bagi Warga Sulawesi Selatan	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan UMKM serta Penguatan Cadangan Pangan	Pengembangan Perekonomian Daerah dan Penguatan UMKM	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	PDRB Per kapita		
			Standar Pelayanan Minimal						Indeks Gini (Gini ratio)	
									Inflasi	
4	Menurunnya Daya Beli Masyarakat akibat Inflasi	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Bonus Demografi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan UMKM serta Penguatan Cadangan Pangan	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	PDRB Per kapita		
			Standar Pelayanan Minimal						Indeks Gini (Gini ratio)	
								Pengembangan Perekonomian Daerah dan Penguatan UMKM		Inflasi
									Meningkatnya produktivitas daerah	Pertumbuhan Ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Parepare



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi	Kota Parepare			
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Relatif Tinggi	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Bonus Demografi	Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan UMKM serta Penguatan Cadangan Pangan	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Serta Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran
6	Meningkatnya Persentase Penduduk Miskin	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>	Bonus Demografi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan UMKM serta Penguatan Cadangan Pangan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
			Standar Pelayanan Minimal	Pemerataan Pendapatan Bagi Warga Sulawesi Selatan				
7	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Perubahan Iklim	Bonus Demografi		Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
8	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Digital		Keberadaan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Dinamis dan	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani	Indeks Birokrasi Reformasi



No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi	Kota Parepare			
				(SDM) yang Berkualitas	Transformasi Digital	pemerintahan yang transparan, akuntabel dan Inovatif		
			Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak			Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
								Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
								Indeks Kepuasan Masyarakat
								Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sumber : RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024 dan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026



4.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

4.2.4.1 Strategi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kota Parepare, maka perlu dirumuskan strategi pencapaiannya. Perumusan strategi dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran pembangunan.

Hasil perumusan strategi pembangunan Kota Parepare Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif.
4. Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar.
5. Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana antar daerah dan lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik.
8. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya.

Uraian ringkas rumusan strategi untuk mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.14

Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar dan kesehatan dengan menghadirkan layanan berkualitas dan terjangkau serta dengan meningkatkan rasio ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk. Meningkatkan kapasitas dan kapabelitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi
2	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan infrastruktur daerah yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan penanaman modal serta pemberdayaan UMKM sesuai potensi yang dimiliki. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pemberian bantuan peralan kerja serta pelatihan manajemen pengelolaan UMKM dan pemasaran hasil produksi UMKM
3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif	Pembangunan infrastruktur daerah yang mampu menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatkan konektivitas antar wilayah maupun antar daerah yang menegaskan Parepare sebagai pusat peredaran barang dan jasa, serta melakukan pemeliharaan secara optimal terhadap infrastruktur yang telah ada
4	Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja	Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, perluasan jaminan perlindungan social bagi tenaga kerja serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga	Mengoptimalkan upaya perlindungan sosial bagi seluruh Masyarakat miskin dan rentan, pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha berbasis rumah tangga dan fasilitasi terhadap lembaga keuangan mikro serta



		keuangan dan pelayanan dasar	peningkatan aksesibilitas layanan gratis terhadap pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, dilakukan koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholders lainnya.
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana antar daerah dan lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.	Mengintegrasikan TPB pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam
7	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	Peningkatan koordinasi dan Kerjasama pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan dalam memelihara keamanan dan tertib masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan tertib lingkungan secara swakarsa dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak
8	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta penyebaran informasi pemerintahan kepada Masyarakat luas
		Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan ASN melalui Diklat dan menghadirkan lembaga pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan sebagai wujud reformasi birokrasi. Serta Meningkatkan kualitas aparatur perencanaan di seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas disertai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab .

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023 (data diolah)



4.2.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15

Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan pemerataan distribusi prasarana dan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan jaminan kesehatan
2	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Meningkatkan pengelolaan pusat-pusat perekonomian daerah, peningkatan kapasitas produksi dan UMKM, dan promosi pariwisata
		Mengoptimalkan daya dukung infrastruktur perekonomian daerah, perbaikan ekosistem pendukung UMKM, investasi dan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah
		Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan
		Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga
3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
4	Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan memperluas kesempatan kerja di sector informal
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran DTKS sebagai basis penerima sasaran program perlindungan sosial. 2. Stabilisasi harga kebutuhan pokok. 3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan 4. Penguatan akses layanan dasar 5. Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Penguatan kolaborasi stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah
7	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	Menciptakan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di daerah.



8	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan Inovatif	Peningkatan kualitas layanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik serta pengembangann inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat fungsional/ substansif serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh pengawasan yang andal, efektif dan efisien
		Penguatan kapasitas SDM dan kualitas hidup serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023

4.2.4.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Program Prioritas Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024 telah dirumuskan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026. Program Prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.16
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan, RSUD. Andi Makkasau, dan RS. Dr. Hasri Ainun Habibe
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
2	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Meningkatnya produktivitas daerah	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
			2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
			3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
			4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
			6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			7. Program Pemasaran Pariwisata		
			8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 10. Program Promosi Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
			14. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenga Kerja
3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya produktivitas daerah	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
5	Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			8. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			9. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setdako
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Pengelolaan Persampahan 	Dinas Lingkungan Hidup
			9. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
7	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	Terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			6. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
8	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan,	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pmbangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	akuntabel dan Inovatif	Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			6. Program Penyelenggaraan Pengawasan 7. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
			8. Program Pendaftaran Penduduk 9. Program Pencatatan Sipil 10. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			11. Program Pengendalian Penduduk 12. Program Pembinaan KB 13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			15. Program Infomrasi dan Komunikasi Publik 16. Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023

4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2024, maka perlu menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan Pembangunan daerah serta kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang merupakan acuan dan pedoman Pembangunan daerah.

4.3.1. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Dengan Sasaran RPD

Konsistensi antara dokumen perencanaan Pembangunan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan agar tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dapat tercapai secara gradual. Untuk itu, perumusan prioritas Pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 telah selaras dengan RPD



Kota Parepare Tahun 2024-2026. Keselarasan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Dengan Sasaran RPD
Untuk Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RKPD	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan RPD	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat		
				1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
		2	Indeks Kesehatan		
		2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	3	Pengeluaran Per Kapita
4	Indeks Pemberdayaan Gender				
2	Pengembangan Perekonomian Daerah dan Penguatan UMKM	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	5	PDRB Per kapita
				3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
3	Meningkatnya produktivitas daerah	7	Inflasi		
		4	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Serta Daya Saing Tenaga Kerja	8	Pertumbuhan Ekonomi
4	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja			9	Tingkat Pengangguran
		5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
		7	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan
13	Indeks Reformasi Birokrasi				



	transparan, akuntabel dan Inovatif	dan reformasi birokrasi yang melayani	reformasi birokrasi yang melayani		
8	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14	Indeks Pelayanan Publik
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	15	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	16	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17	Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	18
				19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

4.3.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembangunan nasional. Untuk itu, Pembangunan Kota Parepare harus dapat berkontribusi secara langsung dalam pencapaian tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2019-2024, yang lebih operasional dalam RKP Tahun 2024. Demikian pula halnya, Pembangunan Kota Parepare juga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Sehingga demikian, sangatlah penting untuk mewujudkan keselarasan perencanaan Pembangunan Kota Parepare dengan prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.18

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional				
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan	a. Nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains) b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas c. Harapan lama sekolah		
		1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan				Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan	a. Angka kematian Ibu dan Bayi b. Prevalensi stunting c. Prevalensi wasting d. Insidensi TBC e. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 Bulan
			Indeks Kesehatan					
		2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender				Meningkatnya kualitas anak, Perempuan dan pemuda	a. Indeks perlindungan anak b. Indeks Pembangunan Gender c. Indeks Pembangunan Pemuda
2	Pengembangan Perekonomian Daerah dan Penguatan UMKM	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan	PDRB Per kapita	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat d	a. Laju Pertumbuhan PDRB b. Persentase Penduduk Miskin KTI		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Parepare



Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	inklusif bagi kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini (Gini ratio)	dan menjamin pemerataan (PN 2)	Kawasan Timur Indonesia (KTI)	
		3. Meningkatnya produktivitas daerah	Inflasi			
4	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Serta Daya Saing Tenaga Kerja	4. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	a. Laju Pertumbuhan PDRB b. Persentase Penduduk Miskin KTI
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	a. Laju Pertumbuhan PDRB b. Persentase Penduduk Miskin KTI
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	6. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana			
7	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan Inovatif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Parepare



Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
8	Pemeliharaan dan ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik			
			Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Memperkuat Stabilitas Politik, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Publik (PN 7)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Nasional		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024 (data diolah)



Tabel 4.19
Dukungan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (EBT)	1 Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	
			2 Peningkatan pasokan bahan bakar nabati			
			3 Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi			
			4 Peningkatan pemenuhan energi domestik			
			5 Pengembangan industri pendukung EBT			
		2 Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1 Pemantapan kawasan berfungsi lindungi (kumulatif)			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			2 Pengelolaan hutan berkelanjutan			
			3 Penyediaan air untuk pertanian			
			4 Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas			
			5 Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau			
	6 Pengembangan waduk multi guna					



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
		3	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	<p>1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan</p> <p>2 Peningkatan ketersediaan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok</p> <p>3 Peningkatan produktifitas kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar</p> <p>4 Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya</p>	<p>1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>2. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan</p> <p>3. Program penanganan kerawanan pangan</p> <p>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>2. Program pengelolaan perikanan budidaya</p> <p>1. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</p> <p>2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <p>3. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</p> <p>Program Penyuluhan pertanian</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p> <p>Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p>



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
			2 Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha		
			3 Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	1. Program Pendidikan dan latihan koperasi 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			4 Peningkatan penciptaan <i>Start-Up</i> dan peluang usaha	Program Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenaga Kerja
			5 Peningkatan nilai tambah usaha sosial		
		6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil dan Industrialisasi	1 Peningkatan industri pengelolaan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Program perencanaan dan Pembangunan industry	Dinas Perdagangan
			2 Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa		
			3 Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk pariwisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	1. Program peningkatan daya Tarik destinasi wisata 2. Program pemasaran pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah		
			4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			5	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	1. Program pengembangan iklim penanaman modal 2. Program pelayanan penanaman modal 3. Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			6	Pengembangan industri halal	Program pengendalian izin usaha industri	Dinas Perdagangan	
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan diversifikasi nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Program Pengembangan Ekspor Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan
			2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor			
			3	Pengelolaan impor			
			4	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif			
			5	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produk global			



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah		
			6	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif	1. Program peningkatan daya Tarik destinasi wisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			7	Peningkatan efektifitas <i>Preferential Trader Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan Diplomasi Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan	
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	1	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
			2	Otimisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan	
			3	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	
			4	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			5	Reformasi fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah		
			6	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Program pengelolaan system informasi industry nasional	Dinas Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan kawasan strategis	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2	Pengembangan sektor unggulan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
			3	Pengembangan kawasan perkotaan	1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
					2.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi			
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1 Percepatan cakupan administarsi kependudukan	Program pengelolaan Administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2 Integritas sistem administrasi kependudukan	Program pengelolaan profil kependudukan	
			3 Pendampingan dan layanan terpadu	Program Pendaftaran penduduk	
			4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Program pengendalian penduduk	
		2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1 Sistem jaminan sosial nasional	Program perlindungan dan jaminan social	Dinas Sosial
			2 Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Program rehabilitasi social	
			3 Perlindungan sosial adatif	Program perlindungan dan jaminan social	
			4 Kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan sosial	
		3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2 Percepatan perbaikan gizi masyarakat		
			3 Peningkatan pengendalian penyakit		
			4 Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
			5	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan dan minuman	
		4 Peningkatan Layanan Berkualitas Pemerataan Pendidikan	1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2	Afirmasi askes dan percepatan wajib belajar 12 tahun		
			3	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			4	Penjamin mutu kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
			5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan		
		5 Peningkatan kualitas anak, Perempuan dan pemuda	1	Pemenuhan Hak dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
			2	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			3	Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	
		6 Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	Keperantaraan usaha dan dampak social	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah			
			3	Reforma agrarian	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
			4	Perhutanan Sosial	-			
		7	1	Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis Kerjasama industri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2	Penguatan Pendidikan tinggi berkualitas				
			3	Penguatan Kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda		
			4	Prestasi olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
4	Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	1	1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja gotong royong, dan budi pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif				
			3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dalam masyarakat dalam pembentukan karakter				



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
			4 Penguatan pusat-pusat perubahan revolusi mental		
			5 Pembangunan dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila		
			6 Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		
		2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1 Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		
			3 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat budaya yang inklusif		
			4 Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia		



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
			5 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		
		3 Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial	1 Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan dikalangan umat beragama	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama		
			3 Penyelarasan relasi agama dan budaya		
			4 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan		
			5 Pengembagngan ekonomi dan sumber daya keagammaan		
		4 Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1 Peningkatan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
			2 Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3 Pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas dan daya cipta	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			4 Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	1. Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Bappeda



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
				2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2			Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	
3			Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
4			Keselamatan dan keamanan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	
5			Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
6			Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR	
2		Infrastruktur Ekonomi	1	Konektivitas jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
2			Konektivitas kereta api	-		
3			Konektivitas laut	-		



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah		
		3	Infrastruktur Perkotaan	4	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				1	Transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				2	Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika
				3	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		4	Energi Ketenagalistrikan	1	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	-	Bukan Kewenangan Kab/Kota
				2	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	-	
				3	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	-	
		5	Transformasi Digital	1	Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemanfaatan Infrastruktur TIK		



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
			Fasilitas Pendukung Transformasi digital		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2 Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3 Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4 Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Peningkatan ketahanan bencana dan Iklim	1 Penanggulangan Bencana 2 Peningkatan ketahanan iklim	Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	BPBD Dinas Lingkungan Hidup
		5 Pembangunan Rendah Karbon	1 Pembangunan energi berkelanjutan 2 Pemulihan lahan berkelanjutan 3 Pengelolaan limbah	- - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
			4 Pengembangan industri hijau	1. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			5 Rendah karbon pesisir dan laut	Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas, Politik, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Publik	1 Konsolidasi Demokrasi	1 Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			3 Peningkatan kualitas komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1 Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
				Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
		3	Penegakan Hukum Nasional	1 Penataan regulasi 2 Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata 3 Penguatan sistem anti korupsi 4 Peningkatan akses terhadap keadilan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum Setdako
		4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1 Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit 2 Transformasi pelayanan publik 3 Penataan kelembagaan dan proses bisnis 4 Reformasi sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penataan Organisasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Organisasi Setdako Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah Inspektorat daerah



NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1 Penguatan keamanan dalam negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP
				3 Penguatan keamanan dan ketahanan siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024



4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Parepare

RKPD Kota Parepare Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Parepare merupakan hasil penjangkangan aspirasi masyarakat pada reses tahun 202 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Parepare Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Pokok-pokok pikiran ini telah ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Parepare Tahun 2024. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran DPRD Kota Parepare terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda.
3. Peningkatan kualitas produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah.
5. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya air
6. Peningkatan kualitas layanan air bersih dan air limbah
7. Peningkatan aksesibilitas layanan Pendidikan dan penanggulangan anak putus sekolah.
8. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan.
9. Peningkatan data Tarik destinasi wisata
10. Perluasan jaminan social bagi Masyarakat miskin dan PMKS.
11. Peningkatan aksesibilitas petani, nelayan dan pelaku UMKM terhadap permodalan.
12. Pengembangan koleksi buku perpustakaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (khususnya bagi Mahasiswa).
13. Peningkatan daya saing tenaga kerja, perluasan lapangan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
14. Penyediaan dan pengembangan saran dan prasarana pertanian, serta pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.
15. Peningkatan Ketahanan Pangan
16. Peningkatan Kualitas Layanan kedaruratan
17. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan daerah
18. Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
19. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui Pembangunan prasarana dan utilitas umum.



20. Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan serta kepariwisataan daerah.
21. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
22. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat kelurahan/kecamatan.

Tabel 4.20
Kesesuaian Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2024

No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.	Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Lingkungan Hidup
2	Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda.	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
3	Peningkatan kualitas produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM.	Koperasi dan UMKM	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Pertumbuhan Ekonomi
5	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pertumbuhan Ekonomi
6	Peningkatan kualitas layanan air bersih dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pertumbuhan Ekonomi
7	Peningkatan aksesibilitas layanan Pendidikan dan penanggulangan anak putus sekolah.	Pendidikan	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas;	Indeks Pendidikan
8	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan.	Kesehatan		Indeks Kesehatan
9	Peningkatan data Tarik destinasi wisata	Pariwisata	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi
10	Perluasan jaminan sosial bagi Masyarakat miskin dan PMKS.	Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;	Tingkat Kemiskinan
11	Peningkatan aksesibilitas petani, nelayan dan pelaku UMKM terhadap permodalan.	Pertanian; Koperasi dan UMKM	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi
12	Pengembangan koleksi buku perpustakaan	Perpustakaan	Peningkatan penyelenggaraan	Indeks Pendidikan



No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan
	daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (khususnya bagi Mahasiswa).		Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	
13	Peningkatan daya saing tenaga kerja, perluasan lapangan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja.	Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran
14	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, serta pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.	Pertanian; Kelautan dan Perikanan	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi
15	Peningkatan Kualitas Layanan kedaruratan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
16	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan	Perencanaan; Keuangan; Pengawasan	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
17	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender
18	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui Pembangunan prasarana dan utilitas umum.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkotaan;	Pertumbuhan Ekonomi
19	Pengembangan ekonomi kreatif, dan kewirausahaan serta kepariwisataan daerah.	Kepariwisata	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi
20	Peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan Pangan	Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	Tingkat Kemiskinan
21	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.	Kepegawaian	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
22	Peningkatan pemberdayaan Masyarakat kelurahan/kecamatan.	Pemberdayaan Masyarakat		

Hal-hal yang tersebut di atas merupakan substansi / intisari dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Parepare yang ditetapkan melalui



Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Sebagai Bahan Masukan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2024.



BAB V

Pemerintah Kota Parepare

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH





BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 mutlak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan pembangunan hingga semester I tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023 harus digunakan untuk tahun 2024.

Perubahan rencana kerja dan pendanaan ini dimaksudkan agar dapat mengakselerasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diseluruh perangkat daerah sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan juga merupakan jawaban terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan rekomendasi dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Kota Parepare hingga semester I tahun 2024.

Usulan perubahan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan disesuaikan dengan kondisi perangkat daerah, serta pertimbangan dari hasil implementasi kegiatan di lapangan terkait dengan progress capaian target kinerja setiap kegiatan tersebut. Dan usulan-usulan ini telah ditelaah secara mendalam oleh Tim Penyusunan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari berbagai pihak.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab III, Perubahan Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.000.563.131.144, yang terdiri dari : i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 232.769.096.786; ii) Pendapatan transfer sebesar Rp. 767.794.034.358. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan



daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang terakumulasi dalam Belanja Daerah. Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.563.131.144.

Target Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 lebih besar dibanding target belanja daerah dalam RPD Tahun 2024-2026, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap SiLPA Tahun 2023 dan pembayaran utang serta kegiatan lanjutan.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority*, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Parepare Tahun 2024.

Rincian kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Parepare, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1.
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Parepare
Tahun 2024

No	Uraian	RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang	Persen
2	BELANJA DAERAH	1.353.398.319.314	1.000.563.131.144	(352.835.188.170)	(26,07)
2.1	Belanja Operasi	1.035.403.595.450	917.307.686.680	(118.095.908.770)	(11,41)
2.1.1	Belanja Pegawai	406.918.250.178	424.665.163.257	17.746.913.079	4.36
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	591.385.345.272	454.667.952.144	(136.717.393.128)	(23.12)
2.1.3	Belanja Bunga	1.500.000.000	1.260.000.000	(240.000.000)	(16.00)
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	35.000.000.000	30.000.000.000	(5.000.000.000)	(14.29)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	-	(600.000.000)	(100.00)
2.2	Belanja Modal	307.994.723.864	82.470.015.741	(225.524.708.123)	(73,22)
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	7.500.000.000	(2.500.000.000)	(25,00)
2.4	Belanja Transfer	-	-	-	-



No	Uraian	RKPD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang	Persen
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	

Sumber :Bappeda Kota Parepare Tahun 2024

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024

Penetapan program prioritas daerah dalam perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2024, prioritas pembangunan dan sasarannya masih sesuai dengan kondisi strategis Kota Parepare sehingga tidak mengalami perubahan. Prioritas pembangunan tersebut, adalah :

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas;
2. Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM;
3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan;
4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
6. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
7. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi
8. Penyelenggaraan refromasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif.

Program prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 terdiri dari 67 program prioritas yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian 8 prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah, dengan rincian : i) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, dengan 6 (Enam) program prioritas; ii) Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM, dengan 16 program prioritas; iii) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, dengan 9 (Sembilan) program prioritas; iv) Peningkatan kompetensi



dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja, dengan 3 (Tiga) program prioritas; v) Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan 7 (Tujuh) program prioritas; vi) Penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan 8 (Delapan) program prioritas; vii) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi, dengan 6 (Enam) program prioritas; viii) Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif, dengan 19 program prioritas. Selengkapnya program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
1	Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (PAUD/SD/SMP)	100	43.206.101.000	100	46.217.037.574	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka partisipasi Murni (PAUD-SD-SMP)	99,35		99,35		
				Angka Pendidikan di Tamatkan	99,25		99,25		
				Angka Putus Sekolah SD/SMP)	0,05		0,05		
				Angka Kelulusan SD/Mi,SMP/MTs	100		100		
				Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP/Paket A/Paket B	1045,90		1045,90		
				Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	121,90		121,90		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	120,85		120,85		
				Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	97,95		97,95		
				Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	98,25		98,25		
			Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	97,35	47.000.000	97,35	41.000.000	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	107.474.562.718	100%	107.474.562.718	Dinas Kesehatan, RSUD. Andi Makkasau, dan RS. Dr. Hasri Ainun Habibe
				Persentase Ketersediaan Fasilitas dan layanan	100%		100%		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Kesehatan untuk UKM dan UKP					
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%		100%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	50/100.00	400.000.000	50/100.00	400.000.000	
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/100.00		98/100.00		
				Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100%		100%		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi	100%	500.000.000	100%	500.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				standar dan aman bagi masyarakat					
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat cakupan Promosi Kesehatan RS	80%	1.750.000.000	80%	1.750.000.000	
					15		15		
2	Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM	Meningkatnya produktivitas daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap	31,7	584.000.000	31,7	630.524.500	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya	15,46	423.950.000	15,46	212.070.000	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan	89,50	116.000.000	89,50	59.467.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Capaian Target Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3	1.118.632.000	3	862.285.300	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Target Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	100	1.535.000.000	100	292.367.637	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100	4.249.000.000	100	297.965.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Durasi Lama kunjungan wisata	100	2.411.000.000	100	342.981.800	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan Pelatihan	100	4.200.000.000	100	117.216.500	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	100	250.000.000	100	41.120.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	174,5	250.000.000	174,5	83.174.000	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Tersedianya pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan perkuatan aplikasi berbasis online	100	300.000.000	100	146.786.000	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	125	100.000.000	125	624.325.000	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang Aktif	100	110.000.000	100	90.199.000	Dinas Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Harga Antar Waktu	0,92%	600.000.000	0,92%	681.062.400	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	7,7 %	1.075.000	7,7 %	129.565.300	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	45,18	925.000.000	60	5.570.723.000	Dinas Tenga Kerja
3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya produktivitas daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembungan air (minimal1,5m) Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	81% 1,71 17,50% 0,38% 60%	204.905.398.700	81% 1,71 17,50% 0,38% 60%	27.455.337.719	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)	65%		65%		
				Persentase irigasi dalam kondisi baik	93,00%	53.965.000.000	93,00%	2.903.950.160	
				Rasio jaringan irigasi	26,90		26,90		
				cakupan layanan irigasi terhadap daerah irigasi (DI)	152,52		152,52		
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan lonsor	59,00%		59,00%		
				Persentase bencana lonsor dan abrasi pada titik rawan bencana	20		20		
				Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	61,66%	19.650.000.000	61,66%	179.652.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	97,5 %	4.200.000.000	97,5 %	355.000.000	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pemenuhan fasilitas perkotaan	5,00	20.500.000.000	5,00	4.559.945.600	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase capaian fasilitas perkotaan Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	84,62 91,00%	6.052.200.000	84,62 91,00%	3.119.449.512	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,	92,00% 99,30%	24.000.000.000	92,00% 99,30%	200.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				perkotaan dan perdesaan					
				cakupan layanan air bersih	98,31%		98,31%		
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Jalan Lingkungan	100 %	10.124.000.000	100 %	4.022.776.018	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	4.600.000.000	100%	2.924.843.140	
4	Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	64,06	920.000.000	64,06	2.296.175.400	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase kesempatan kerja yang ada	83,76	154.000.000	83,76	67.592.100	
			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja di perusahaan	86,32	570.000.000	86,32	211.141.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	100	180.000.000	100	7.200.000	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	100	1.110.000.000	100	473.064.500	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan Fakir Miskin	100	4.360.000.000	100	456.944.000	
				Cakupan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Terasilitasi	100		100		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan	204,9	525.000.000	204,9	50.008.500	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	100	1.255.000.000	100	388.573.400	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penanganan Rawan Pangan	100	130.000.000	100	31.242.000	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan hasil fasilitasi hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.200	9.740.903.200	3.200	8.181.056.600	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan miitgasi bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemenuhan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	100% 0,005%	170.000.000	100% 0,005%	88.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				terhadap luas lahan keseluruhan					
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan	12,63%	2.682.160.000	12,63%	1.797.997.500	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemenuhan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	260.000.000	100%	200.000.000	BPBD
			Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	99%	13.065.000.000	99%	9.992.196.100	
				Persentase jumlah sampah yang berkurang 3R	28%		28%		
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	71%		71%		
				Persentase cakupan area pelayanan	94%		94%		
				Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA	75		75		
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	1.056.000.000	100%	1.382.087.000	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	950.000.000	100%	488.754.900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	345.000.000	100%	45.131.000	Dinas Sosial
7	Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung	Terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif untuk penyelenggaraan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100	1.968.100.000	100	1.358.425.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
	pelaksanaan pesta demokrasi	Pemilu dan Pilkada Serentak	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada Masyarakat	100	29.536.501.650	100	16.326.374.393	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100	590.000.000	100	560.000.000	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase penurunan pengguna narkoba di Kota Parepare	2	860.000.000	2	169.199.500	
					Persentase Potensi konflik agama yang tertangani		100		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	100	9.036.852.886	100	5.930.941.104	



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	6.000.000.000	100	1.739.424.150	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100		100		
				Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	32		32		
8	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pmbangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD/RPD terhadapRKPD	100	2.090.000.000	100	2.090.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase konsistensi program RKPD terhadap APBD	100		100		
				Rata-rata capaian kinerja program	100		100		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				pembangunan daerah					
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, Ren ja) lingkup bidang PPM	100	1.870.000.000	100	1.870.000.000	
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, Ren ja) lingkup bidang	100		100		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja) lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100		100		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	100	12.340.296.000	100	9.676.940.100	Badan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan bukti kepemilikan yang sah	100	1.597.000.000	100	1.021.450.300	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	100	5.753.900.000	100	3.429.269.100	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	60,00	203.269.500	60,00	5.468.481.643	Inspektorat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelanggaran Pegawai Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,40 3	244.944.500	0,40 3	740.408.300	
			Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,99	110.000.000	0,99	72.430.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,7	65.000.000	99,7		
				Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100		100	38.392.00	
				Rasio bayi ber akte kelahiran	1		1		
				Rasio pasangan nikah berakte nikah	80,55		80,55		
				Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	99,99		99,99		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	100		100		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	100	70.000.000	100		
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100		100	60.116.800	
				Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi	100		100		
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam	45%	487.000.000	45%	107.799.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pembinaan KB	pembangunan Daerah melalui Kampung KB Ratio Akseptor KB	65%	1.179.699.009	65%	2.735.918.024	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL, ber-KB	BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82,	1.619.955.400	BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82,	1.362.255.000	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.000.000	7.124.661.380	2.000.000	3.208.568.500	Dinas Perhubungan
				Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	3.000.000		3.000.000		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun	3.000.000		3.000.000		
				Panjang jalur kereta api	0		0		
				Persentase rambu dan Apill dalam kondisi baik	85		85		
				Jumlah uji KIR angkutan umum	100		100		
				Rasio ijin trayek	0,0005		0,0005		
				Persentase layanan angkutan darat	70		70		
				Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,093		0,093		
				Persentase pemasangan rambu-rambu	85		85		
				Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	25		25		

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Infomrasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	9.097.000.000	100	5.507.520.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	100		100		
				Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam	4		4		



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan					
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	87,15	3.930.000.000	87,15	2.554.827.000	
			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	94,46	94,46				
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	83,59	83,59				
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100				



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
				Proporsi individu yang menggunakan internet	83,59		83,59		
				Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	94,46		94,46		
				Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	83,59		83,59		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	27	1.164.368.200	27	110.000.000	BKPSDM
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	6,8		6,8		
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemangku jabatan fungsional	100%	2.385.509.000	100%	1.212.178.500	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target RKPD 2024		Target RKPD-P 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	tertentu/pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Cakupan hasil koordinasi, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	2.609.561.000	100%	1374.922.900	Setdako
						648.439.064.000			

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024 (data diolah)



5.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan hingga Semester I Tahun 2024. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan RKPD, merupakan respon dari seluruh perangkat daerah untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mencapai target pembangunan.

Perumusan program dan kegiatan juga memperhatikan prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar serta urusan pilihan dan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam perumusan perubahan RKPD Tahun 2024. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.3 dan Rincian Perubahan Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :



Tabel 5.3

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / (Berkurang)
		RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208,119,111,513	222,679,749,486	222,745,150,160	
2	Dinas Kesehatan	114,694,521,118	104,539,637,991	107,239,441,560	
3	RS. Dr. Hasri Ainun HabibiE	151,896,918,065	50,029,805,914	64,710,836,414	
4	BLUD RSUD. A. Makkasau	35,061,119,679	136,494,134,365	146,330,188,452	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344,386,378,700	36,644,243,256	48,877,646,776	
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26,596,630,415	7,797,553,290	14,615,222,929	
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	13,055,553,354	8,382,382,412	8,395,313,162	
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7,368,821,222	7,969,815,766	7,969,815,766	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,367,725,000	5,137,440,439	5,137,440,439	
10	Dinas Sosial	10,425,000,000	5,100,155,845	5,100,155,845	
11	Dinas Tenaga Kerja	9,178,117,795	14,585,309,057	14,585,309,057	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / (Berkurang)
		RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,802,120,000	5,137,540,845	5,137,540,845	
13	Dinas Ketahanan Pangan	6,420,022,297	5,366,921,907	5,366,921,907	65,400,674.00
14	Dinas Lingkungan Hidup	23,092,969,579	19,224,830,186	19,224,830,186	2,699,803,569.00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,280,099,744	4,194,827,694	4,194,827,694	14,681,030,500.00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,066,102,538	7,538,650,331	7,538,650,331	9,836,054,087.00
17	Dinas Perhubungan	14,136,591,380	9,981,153,670	9,981,153,670	12,233,403,520.00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,205,592,500	13,426,941,524	13,426,941,524	6,817,669,639.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,148,433,645	6,519,524,341	6,519,524,341	12,930,750.00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	32,980,420,000	10,115,070,645	10,167,390,645	-
21	Dinas Perpustakaan	4,691,500,000	4,454,158,063	4,454,158,063	-
22	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	15,999,710,000	10,790,747,354	11,278,694,083	-
23	Dinas Perdagangan	7,563,194,516	6,477,245,125	6,477,245,125	-
24	Sekretariat Daerah	47,816,983,958	42,901,768,349	42,901,768,349	-

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / (Berkurang)
		RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	
25	Sekretariat DPRD	57,006,861,792	57,534,183,281	57,534,183,281	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,778,576,153	8,381,270,053	8,381,270,053	-
27	Badan Keuangan Daerah	50,497,676,000	52,169,433,544	50,079,985,344	-
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,514,200,000	5,966,700,818	5,966,700,818	-
29	Inspektorat Daerah	9,991,576,930	7,672,808,130	16,371,643,673	-
30	Kecamatan Bacukiki	7,136,976,397	8,105,996,222	8,105,996,222	-
31	Kecamatan Bacukiki Barat	10,505,943,488	11,856,873,647	11,856,873,647	-
32	Kecamatan Soreang	11,269,825,000	12,064,034,621	12,064,034,621	52,320,000.00
33	Kecamatan Ujung	12,260,642,000	9,052,968,841	9,052,968,841	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47,082,404,536	29,473,307,321	28,773,307,321	487,946,729.00
Jumlah Total		1,353,398,319,314	947,767,184,333	1,000,563,131,144	52,795,946,811

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023





BAB VI

Pemerintah Kota Parepare

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Parepare telah tertuang dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026. Kinerja penyelenggaraan pemerintah disusun dalam beberapa jenis Indikator Kinerja Daerah beserta target-target kinerjanya. Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi hal yang substansial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terbagi atas 5 (lima) jenis, yaitu: i) Indikator Makro Pembangunan; ii) Indikator Kinerja Utama (IKU); iii) Indikator Kinerja Kunci (IKK); iv) Indikator SPM; dan v) Indikator TPB/SDG's.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara makro, yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Pencapaian kinerja makro merupakan dampak ataupun manfaat dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta pihak swasta dan para pemangku kepentingan lainnya. Indikator Makro pembangunan terdiri dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
3. Pengangguran
4. Indeks Gini (Gini Ratio)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. PDRB Perkapita

Perubahan terhadap target indikator makro pembangunan Kota Parepare Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan target-target



pembangunan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026, pencapaian target pada tahun 2023 serta kondisi riil Kota Parepare hingga semester I tahun 2024. Secara lengkap, Target kinerja makro pembangunan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Capaian Indikator Makro Tahun 2023 dan Target Indikator Kota Parepare Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,88	6,50	6,50
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,34	5,18	5,18
3	Tingkat Pengangguran	%	5,86	4,92	4,92
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka/ Nilai	0,381	0,332	0,332
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	79,03	79,43	79,43
6	PDRB Perkapita	Juta Rp	58,08	60,99	60,99

Sumber : BPS Tahun 2023 dan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah (*Impact*). Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Parepare Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,03	79,43	79,43
2	Indeks Pendidikan	Angka	76,06	76,83	76,83
3	Indeks Kesehatan	Angka	79,66	80,12	80,12



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
4	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp	14,495	14,450	14,450
5	Indeks Penberdayaan Gender	Angka	73,52	79,13	79,13
6	PDRB Per Kapita	Juta Rp	58,78	60,99	60,99
7	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,377	0,332	0,332
8	Inflasi	Persen	2,22	3,0	3,0
9	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,88	6,50	6,50
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,34	5,18	5,18
11	Tingkat Pengangguran	Persen	5,86	4,92	4,92
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,68	77,72	77,72
13	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Angka	0,42	0,53	0,53
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,12 (CC)	67,00 (CC)	67,00 (CC)
15	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,58	4,50	4,50
16	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	79,76	84,63	84,63
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,76	84,63	84,63
18	Predikat SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Predikat	2,62 (Baik)	3,0 (Baik)	3,0 (Baik)
19	Nilai SAKIP	Nilai	62,07 (B)	65,04 (B)	65,04 (B)
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	66,46	68,60	68,60

Sumber : BPS Tahun 2022 dan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026

6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators (KPI)* memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan (*progress*) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026. Olehnya itu, penetapan IKK Kota Parepare Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Kota Parepare. Target Indikator Kinerja



Kunci Pemerintah Kota Parepare Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Realisasi Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 dan Target
Indikator Kinerja Kunci Kota Parepare Tahun 2024

No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,88	6,5	6,5
2	Laju Inflasi	persen	4,09	3,00	3,00
3	PDRB per kapita	Juta Rupiah	58,78	60,99	60,99
4	Indeks Gini	Angka	0,381	0,332	0,332
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	79,03	78,93	78,93
6	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	99,98	97,24	97,24
7	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,7	14,55	14,55
8	Angka Usia harapan hidup	Tahun	71,78	71,79	71,79
9	Persentase balita gizi buruk	persen	0,12	0,02	0,02
10	Prevalensi balita gizi kurang	persen	4,93	5,72	5,72
11	Angka partisipasi angkatan kerja	persen	63,61	69,03	69,03
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	65,52	68,60	68,60
13	Tingkat pengangguran terbuka	persen	5,86	7,52	7,52
14	Rasio penduduk yang bekerja	persen	94,14	93,01	93,01
15	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	79,76	77,92	77,92
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	16,66	17,62	17,62
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
19	Skor pola pangan harapan (konsumsi)	Angka	89	96,50	96,50
20	Penguatan cadangan pangan	Angka	120,00	147,50	147,50
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	0,99	1,02	1,02
22	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	0,26	0,24	0,24
23	Kontribusi Sektor	Persen	16,67	15,60	15,60



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	Perdagangan terhadap PDRB				
24	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	2,09	1,82	1,82
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan anak usia dini (APM PAUD)	Persen	41,57	65,35	65,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	94,94	100,00	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	Persen	91,98	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	113,5	141,16	141,16
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	81,36	99,35	99,35
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	Persen	59,05	99,35	99,35
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Paket C	Persen	86,42	138,25	138,25
8	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	0,63	1,24	1,24
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	813,61	1045,85	1045,85
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	590,47	1035,85	1035,85
11	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	864,21	1281,74	1281,74
12	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0,05	0,05
13	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,31	0,03	0,03
14	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA	Persen	0,74	0,07	0,07
15	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	71,31	117,52	117,52
16	Angka Kelulusan SMP/Mts	Persen	99,80	100,00	100,00
17	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	97,22	113,80	113,80
18	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	Persen	146,63	122,75	122,75



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
19	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	120,48	120,75	120,75
20	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	98,08	97,85	97,85
21	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	93,94	98,25	98,25
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		52,93	52,58	52,58
23	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		27,97	28,91	28,91
24	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		782,47	803,07	803,07
25	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		966,27	842,73	842,73
26	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		40,06	39,60	39,60
27	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah			400,00	400,00
28	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	57,15	69,34	69,34
29	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00	100,00	100,00
30	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00	99,99	99,99
31	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV	Persen	98,16	97,55	97,55
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	DINAS KESEHATAN				
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru	Orang	11.61	8,16	8,16
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	972.00	970,80	970,80
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Orang	0.41	0,00	0,00
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	angka	10.37	6,10	6,10



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	angka	124.43	246,83	246,83
6	Rasio Posyandu per satuan balita	angka	11.06	57,19	57,19
7	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pemb. per 100.000 penduduk	angka	0.29	0,32	0,32
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	angka	0.03	0,03	0,03
9	Rasio dokter persatuan penduduk	angka	0.53	4,90	4,90
10	Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk	angka	1.13	12,19	12,19
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100,00	100,00
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.88	78,29	78,29
13	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	Persen	100	98,18	98,18
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100,00	100,00
15	Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	Persen	N/A	59,31	59,31
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100	94,34	94,34
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	0.016	0,02	0,02
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100,00	100,00
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	67.52	81,29	81,29
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Persen	322.50	280,00	280,00
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Persen	4.06	4,00	4,00
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	67.52	90,00	90,00
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	82.787	90,00	90,00
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita	Persen	100	100,00	100,00



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	penyakit DBD				
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100,00	100,00
26	Angka kejadian akibat malaria	Persen	11.23	8,00	8,00
27	Angka kematian akibat malaria	Persen	0.00	0,00	0,00
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	0.00	0,00	0,00
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0.00	0,00	0,00
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0.87	<5	<5
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen	73	80,00	80,00
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	77.78	60,00	60,00
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	145,40	145,40
34	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	81,33	81,33
35	Cakupan Puskesmas	Persen	200	240,00	240,00
36	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	100	70,90	70,90
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100.00	54,00	54,00
38	Cakupan pelayanan nifas	Persen	95.00	57,45	57,45
49	Cakupann neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	108,89	108,89
40	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	93.86	78,05	78,05
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100,00	100,00
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99.00	100,00	100,00
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100,00	100,00



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100,00	100,00
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100,00	100,00
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	74.9	81,00	81,00
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	1.97	1,71	1,71
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Persen	83.17	95,00	95,00
4	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	18.9	20,37	20,37
5	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	Persen	38	38,00	38,00
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	89.4	95,00	95,00
7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Persen	0	0	0
8	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	94.43	91,00	91,00
9	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	95	95,84	95,84
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	81	89,00	89,00
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ltr/dtk	57.24	98,48	98,48



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
12	Rasio Jaringan Irigrasi	Persen	22.69	26,90	26,90
13	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	94.25	98,31	98,31
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	94.25	99,30	99,30
15	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	N/A	1,66	1,66
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	N/A	16,37	16,37
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		N/A	1,85	1,85
18	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		80	79,46	79,46
19	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0
20	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan		0	0	0
21	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100,00	100,00
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	Rasio rumah layak huni		0.23	0,22	0,22
2	Rasio permukiman layak huni		14.36	0,57	0,57
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	94.13	95,17	95,17
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	71.80	98,74	98,74
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	2.53	2,00	2,00
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	5.65	4,00	4,00
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	11.23	17,69	17,69



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
8	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100,00	100,00
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Persen	37.9	46,52	46,52
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100,00	100,00
3	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100,00	100,00
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100,00	100,00
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Cakupan	100	100	100
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	DINAS SOSIAL				
1	PMKS Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	66.00	100,00	100,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100.00	100,00	100,00
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	92.10	100,00	100,00
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	11,00	11,00	11,00
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persn	100	100,00	100,00

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Parepare Tahun 2024**



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	8	9	9
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100,00	100,00
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100,00	100,00
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	31.5	34,87	34,87
II	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR				
VII	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				
	DINAS TENAGA KERJA				
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun	Persen	11	8,00	8,00
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan PB	Persen	N/A	85,00	85,00
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	84.06	85,00	85,00
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	Persen	91.5	100,00	100,00
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	0	0,00	0,00
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	70.2	85,00	85,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	90.9	82,00	82,00
8	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	N/A	33,56	33,56
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN				



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	18.79	24,41	24,41
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	persen	20	20,00	20,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	81.21	86,00	86,00
4	Rasio KDRT	Persen	0.098	0,09	0,09
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	0,00	0,00	0,00
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	51.44	38,20	38,20
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT	Persen	100	100,00	100,00
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100,00	100,00
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100,00	100,00
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100,00	100,00
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak	Persen	100	100,00	100,00



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	korban kekerasan				
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100,00	100,00
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0.991	1,00	1,00
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		0.968	1,14	1,14
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		0.938	0,84	0,84
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		1.012	1,68	1,68
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		1	1,00	1,00
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian		45.3	43,69	43,69
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	DINAS KETAHANAN PANGAN				
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kapita	255	257,29	257,29
2	Ketersediaan energi protein per kapita	Persen	100	100,00	100,00
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	100	100,00	100,00
X	PERTANAHAN				
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Angka	3	5	5
2	Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat	Persen	1,32	0,50	0,50
XI	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	DINAS LINGKUNGAN				



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	HIDUP				
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Ada	Ada	Ada
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Persen	82.14	95,00	95,00
5	Hasil pengukuran indeks kualitas udara		90	90,00	90,00
6	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Persen	62	62,00	62,00
7	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di yang Diterbitkan	persen	100	100,00	100,00
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD)	persen	Ada	Ada	Ada
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	persen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Penetapan Hak MHA	persen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	persen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	persen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	1	1	1
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	Ada	Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi	persen	100	100,00	100,00



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota.				
17	Timbulan Sampah yang Ditangani	persen	99	99,00	99,00
18	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	persen	27	30,00	30,00
19	Persentase Cakupan Area Pelayanan	persen	93	95,00	95,00
20	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	persen	72	71,00	71,00
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	persen	75	75,00	75,00
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	persen	100	100,00	100,00
23	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta	persen	100	100,00	100,00
XII	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk		1,00	1,00	1,00
2	Rasio bayi ber akte kelahiran		1,00	1,00	1,00
3	Rasio pasangan nikah berakte nikah		0,86	0,87	0,87
4	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada
5	Cakupan penerbitan KTP	Persen	100	100	100
6	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	persen	100	100	100
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1.26	1,50	1,50
2	Total Fertility Rate	Persen	2.35	2,22	2,22
3	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Persen	100	40,00	40,00



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
4	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	12.12	30,96	30,96
5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	1,60	1,60
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		5	5,00	5,00
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		38	61,20	61,20
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2.79	3,91	3,91
9	Rasio akseptor KB		0.66	65,60	65,60
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49		13	12,82	12,82
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		20	14,05	14,05
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		1.76	0,01	0,01
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		9.77	13,85	13,85
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	36,00	40,34	40,34
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		48,09	37,91	37,91
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		100	86,55	100
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		80	86,52	86,52



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		67	74,32	74,32
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	unit	0	0,00	0,00
20	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa		990	950,00	950,00
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		100	100,00	100,00
22	PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		67.23	75,00	75,00
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		100	100,00	100,00
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		100	100,00	100,00
25	Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100,00	100,00
26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa		100	100,00	100,00
27	Persentase remaja yang terkena IMS	Persen	0	0,00	0,00
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		100	100,00	100,00
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		100	76,01	100



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita		22.5	21,00	21,00
31	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,54	0,56	0,56
XIV	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				
	DINAS PERHUBUNGAN				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Ribu jiwa	1.769.401	2.000.000	2.000.000
2	Rasio ijin trayek		0.00000	0,00050	0,00050
3	Jumlah uji KIR angkutan umum		350	100,00	100,00
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		6	6	6
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	60	19,40	60
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	N/A	70,60	70,60
7	Pemasangan Rambu-rambu		39	30,00	40
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0.092	0,10	0,10
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		2.764.512	3.300.000	3.300.000
XV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
2	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	N/A	87,15	87,15
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	93.48	94,46	94,46
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	83.41	98,76	98,76
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	30,81	29,54	29,54



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	DINAS TENAGA KERJA				
1	Persentase koperasi aktif	Persen	56,38	55,52	57,00
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	N/A	32,00	32,00
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	100	100,00	100,00
XVII	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	unit	951	124	955
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	197,11	175	198
3	Rasio daya serap tenaga kerja		0.66	5	5
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	12.63	1,40	1,40
XVIII	Urusan pemerintahan bidang KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	100	100,00	100,00
2	Persentase wirausaha muda	persen	3,22	10,62	10,62
3	Cakupan pembinaan olahraga	persen	38	96,55	96,55
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	89,13	90,00	90,00
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	persen	99,10	100,00	100,00
6	Jumlah Atlet Berprestasi	orang	35	100,00	100,00
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	48	78,00	78,00
XIX	STATISTIK				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	terintegrasi				
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
XX	PERSANDIAN				
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	87,88	87,88
XXI	KEBUDAYAAN				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	5	5
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan	Objek	41	41	41
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Objek	102	41	41
XXII	PERPUSTAKAAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	32057	54.750	54.750
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	42739	49,740	49,740
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	13326	13399,00	13399,00
4	Rasio perpustakaan per satuan penduduk		1.09	1,10	1,10
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	39	39	39
XXIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN KEARSIPAN				
	DINAS PERPUSTAKAAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47,06	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	11	11	11



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN				
XXIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Produksi perikanan	ton	132,8	133,57	133,57
2	Konsumsi ikan	persen	88,57	79,18	79,18
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	13,61	16,42	16,42
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	55,65	53,74	53,74
5	Nilai tukar nelayan			102,85	102,85
XXV	PARIWISATA				
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA				
1	Kunjungan wisata	%	93,33	99,50	99,50
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	3,42	2,60	2,60
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	9.370.000 .000	10.184.64 2.590	10.184.64 2.590
	PERTANIAN				
	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebuna terhadap PDRB	%		1,02	1,02
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%		36,38	36,38
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%		5,45	5,45
4	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	49,07	21,45	21,45
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6,11	5,58	5,58
6	Cakupan bina kelompok petani	%	32,83	28,02	28,02
	PERDAGANGAN				
	DINAS PERDAGANGAN				
1	Nilai ekspor bersih perdagangan	Milyar Rupiah	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usahan	Persen	34,9	22,42	22,42



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	Informal				
	PERINDUSTRIAN				
	DINAS PERDAGANGAN				
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	14,25	24,25	24,25
XXVI	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD				
	SEKRETARIAT DPRD				
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPD maupun Dokumen RKPD	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
XXVII	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	telah ditetapkan dengan PERKADA				
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Persen	96,75	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	94,44	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	85,05	100	100
KEUANGAN					
BADAN KEUANGAN DAERAH					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	1.16	1,18	1,18
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	2.94	2,91	2,91
4	Persentase belanja pendidikan (20 %)	persen	19.70	18,87	18,87
5	Persentase belanja kesehatan (10 %)	persen	8.25	40,13	40,13
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		59.02% : 39.85%	59.79% : 41.15%	59.79% : 41.15%
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,00%	0,00	0,00
8	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
KEPEGAWAIAN					
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
1	Rata-rata lama pegawaimendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jp	31	27,00	27,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	15	2,69	2,69
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	67,73	6,80	6,80
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi	Orang	34	35	35



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
	pemerintah				
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	719	1,335	1,335
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2140	2,246	2,246
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	35	34	34
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	100	100
	UNSUR PENGAWASAN				
1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	58,00	60,00	60,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0,35	0,32	0,32
3	Jumlah Temuan BPK	Temuan		9,00	9,00
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				
	SEMUA KECAMATAN				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	77	80	80
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100
5	Persentase LSM aktif	Persen	100	100	100
XXVII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
2	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Persen	100	100	100
3	Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan Pemerintahan/SKPD/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				RKPD 2024	RKPD-P 2024
4	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	Persen	13,46	20	20
5	Persentase Wilayah Kota Parepare berpotensi konflik agama yang ditangani	Persen	100	100	100
6	Persentase Penurunan jumlah potensi konflik di lingkungan masyarakat	Persen	100	100	100
7	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Persen	38,61	28,90	28,90

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2022

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Secara lengkap, Target kinerja SPM pemangunan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dan
Target Standar Pelayanan Minimal Kota Parepare Tahun 2024

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				Target RKPD 2024	Target RKPD-P 2024
1.	Pendidikan				
1.1.	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini	100%	56,13	100%	100%
1.2.	Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar	100%	97,19	100%	100%
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	3,77	1,85	1,85
1.3.	Persentase warga negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	96,56	100%	100%
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya		1,50	1,50
2.	Kesehatan				
2.1.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%



No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				Target RKPD 2024	Target RKPD-P 2024
2.2.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95,00%	100%	100%
2.3.	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	99,75%	100%	100%
2.4.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanankesehatan	100%	93,86%	100%	100%
2.5.	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
2.6.	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	62,51%	100%	100%
2.7.	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
2.8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	30,41%	100%	100%
2.9.	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
2.10.	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	89,83%	100%	100%
2.11.	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97,74%	100%	100%
2.12.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%	94,59%	100%	100%



No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				Target RKPD 2024	Target RKPD-P 2024
	manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				
3.	Pekerjaan Umum				
3.1.	Persentase penduduk yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	94,25%	100%	100%
3.2.	Persentase penduduk yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	87,87%	100%	100%
4.	Perumahan Rakyat				
4.1.	Persentase korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%
4.2.	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%
5.	Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan	100%	100%	100%	100%



No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				Target RKPD 2024	Target RKPD-P 2024
	hukum perda dan perkada				
5.2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
5.3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
5.5	Persentase penduduk yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%
6.	Sosial				
6.1.	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%
6.2.	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatakan pelayanan	100%	100%	100%	100%
6.3.	Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%



No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian	
				Target RKPD 2024	Target RKPD-P 2024
6.4.	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	100%
6.5.	Persentase korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Parepare, 2023 (data diolah)

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's)

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas



pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan target pencapaian TPB/SDGs tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6.5
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022-2023
dan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kota Parepare Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social) sebagai total belanja pemerintah	Persen	49,07	45,23	30	30
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen	5,41	5,34	5,24	5,24
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	85	90,89	95	95
1.3.1.(c)	Jumlah Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tepenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen	163	18	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	4.441	4.207	4560	4560
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	95	99,751	98	98
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	100	100	100	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	77		85	85
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air layak dan berkelanjutan	Perseen	95,04	94,25	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	88,81	87,87	100	100
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	12,72	11,23	4,5	4,5
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	87,33	59,05	75,80	75,80
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	93,45	81,36	99,07	99,07
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	100	100	99,99	99,99
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Persen	0,0002	0,0002	0,00166	0,00166
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	22	22	22	22
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persen	100	100	100	100



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Persen	100	100	100	100
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Persen	-	-	N/A	N/A
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Wilayah	4	4	4	4
1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN						
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	3,92		3.20	3.20
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	13,7	11,911	10	10
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	Persen	4,02		N/A	N/A
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	13,7	8,737	<30	<30
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persen	13,9	8,315	<30	<30
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	5		5	5
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	9	3,52	10	10



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	60	56,56	60	60
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	88	89	91	91
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kasus	5	3	1	1
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	98	99,75	98	98
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	98	99,75	98	98
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha						
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	0	0,415	2	2
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	8	10,369	4	4
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8	11,613	5	5
3.2.2.(b)	Persentase kecamatan yang mencapai 80Persen imunisasi dasar lengkap bayi	Persen	100	100	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Per 1000	0,35	0,011	0,01	0,01
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	per 1000	<0,05	<0,087	<0,05	<0,05
3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang	per 1000	3	3,17	1,5	1,5
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	per 100000	290	316,89	200	200



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	per 1000	0,07	0,11	0,06	0,06
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	per 100000	14	11,85	14	14
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	6	2	7	7
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Persen	20	1,92	25	25
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Per 1000 penduduk usia >15 tahun	20	1,92	15	15
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	30	2,78	30	30
3.4.2.(a)	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah	8	8	8	8
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan						
3.5.1(e)	Prevelensi penyalahgunaan narkoba	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan dan integrasi Kesehatan reproduksi kedalam strategi dalam program nasional.						
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	62,97	66,62	59,1	59,1



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persen	54,26	66,62	59,1	59,1
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Jumlah	36,076	36,3	45	45
3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persen	20	20	2,25	2,25
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Persen	2,35	2,35	2,19	2,19
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1.(a)	Unmet need pelayan kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
3.8.2	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	per 1000	850	846	900	900
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	85	90,89	90	90
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	45	1,92	25	25
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama beengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	100	100	100	100
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	99	100	99	99
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	1,015		0,001	0,001



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen	92	93	99	99
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	34,73		95	95
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	41,66		95	95
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Persen	94,48	94,94	100	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Persen	87,96	91,98	100	100
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	15,25		14,5	14,5
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Sekolah TK/Paud Negeri	92,85	41,57	42,5	42,5
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	95	94	95	95



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	93,25		99,03	99,03
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	-	-	44	44
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Masyarakat / Orang tidak mampu	100	100	99,98	99,98
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persen	99,81		99,98	99,98
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	BH	9	14	9	9
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,07	0,033	0,07	0,07
5.2.1.(a)	Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan	Persen	0,03	0,12	0,06	0,06



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,06	0,33	0,06	0,06
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komperensif	Persen	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat Perempuan						
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persen	0,37	1,15	0.28	0.28
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Umur	21	22,5	21	21
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Persen	17,38	20	17,38	17,38
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Orang	20	20	24	24
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persen	37		37	37
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan Perempuan						
5.b.1.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	81,28	81,28	100	100
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen[1]dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut.						



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
5.6.2. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	90	90	97	97
UJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA						
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	95,04	94,25	100	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	ltr/dtk	349,91	355,91	355,91	355,91
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	95,04	94,25	100	100
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	90	97,79	95	95
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persen	88,81	87,87	100	100
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah	22	22	22	22
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah	22	22	22	22
6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kota	N/A	N/A	N/A	N/A



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah	-	-	N/A	N/A
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	-	-	N/A	N/A
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Nilai	96,4	82,14	96,6	96,6
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.						
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Ada/Tidak Ada	Ada Regulasi	Ada Regulasi	Ada Regulasi	Ada Regulasi
6.5 Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya						
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	WS	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	WS	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Keg	N/A	N/A	N/A	N/A



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
TUJUAN 8. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	4,5	4,5	4,5	4,5
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Juta	54,26	54,26	57,53	57,53
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Miyar Rp	3,55	3,55	6,00	6,00
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Juta	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	3.804	3.804	3.000	3.000
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Persen	56,03	56,03	55,7	55,7
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persen	43,97	43,97	6,2	6,2
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persen	78	78	99	99
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah	25.126	25.126	24.367	24.367
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	5,60	5,86	6,39	6,39
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Persen	0	0	N/A	N/A
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	45,00	45,00	45	45



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Persen	6,45	6,68	6.69	6.69
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	2.222	2.806	1.050	1.050
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	928.517	930.294	70.000	70.000
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Orang	308	396	930	930
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI						
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	km	0	0	0	0
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	3/0/3	3/0/3	3/0/3	3/0/3
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	Persen	0.89	0	1.1	1.1
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDRB industry maufaktur	Persen	7.5	0	8.4	8.4
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	persen	11,75	0	12,50	12,50
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Persen	58.93	0	59.4	59.4
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Persen	50.91	0	56.00	56.00
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	91,8	91,8	88	88
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	81,28	81,28	100	100



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	81,06	81,06	88	88
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA						
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40Persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
10.1.1*	Koefisien Gini.	Angka	0,379	0,379	0,348	0,332
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.						
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah	0	0	0	0
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan social bidang ketenagakerjaan	Persen	97,64	97,64	91,4	91,4
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
11.b Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	1	1	1	1
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	82,70	71,80	85	85



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah	N/A		N/A	N/A
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persen	0,0002	0,0002	0,00166	0,00166
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	N/A	-	N/A	N/A
11.5.1.(b)	Indeks risiko bencana indonesia	Indeks	N/A		N/A	N/A
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah	0	0	0	0
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Juta	466.222.550	466.222.550	0	0
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	73	72	72	72
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Nilai	0	0	0	0
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	30	30	40	40
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persen	26	27	27	27
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka						



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	1	1
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.						
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	1	1	1	1
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.	Dokumen	1	1	1	1
13.1.2.	Jumlah korban meninggal, hilang, terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per100.000	0,0002	0,0002	0,00166	0,00166
TUJUAN 14: MENGKONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDRA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN						
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.						
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Persen	101		99	99
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.						
14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan pelaku usaha	Persen	62,65		54,4	54,4
14.b.1.(b)	Jumlah Nelayan yang terlindungi	Orang	110		150	150
TUJUAN 15. MELINDUNGI RESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARAT, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	12,62	12,62	12,63	12,63
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0,01	0	0,01	0,01
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.						
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Regulasi	Ada Regulasi	Ada Regulasi	1	1
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	1	1	1
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	1	1	1	1
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kasus	0	0	1	1
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0,12	0,15	4	4
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen	99,57	99,63	100	100
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persen	0,03	0,04	0,02	0,02
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki	Persen	0,01	0,03	0,02	0,02



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	0,06	0,12	0,06	0,06
16.2.3.(a)	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persen	0,02	1,4	0,02	0,02
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persen	0,19	1,4	0,14	0,14
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Nilai	N/A	-	N/A	N/A
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	90,12	90,16	90,16	90,16
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Opini	67,84(B)	67,84(B)	61,50(B)	61,50(B)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	100	100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah (SKPD) yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Persen	63,5	61,12	62,5	62,5
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (SKPD)	Persen	4,46	3,85	3,65	3,65
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	24		28	28



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	22,86	32,35	23,52	23,52
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	100	100	99,99	99,99
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persen	N/A	-	N/A	N/A
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	100	100	99,99	99,99
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	orang	2	2	5	5
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dlm 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	N/A	-	N/A	N/A
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persen	19,98	22,29	21,44	21,44
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	4,46	4,87	4,96	4,96



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	3,70	04,01	4,21	4,21
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Persen	N/A	-	N/A	N/A
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	81,6		88	88
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	81,06		88	88
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah	N/A	-	N/A	N/A
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah	N/A	-	N/A	N/A
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang telah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen			100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	91	91	92	92



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Target SDGs	
					RKPD 2024	RKPD-P 2024
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meta data	12	12	12	12
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen	86,49	86,49	65	65
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Jumlah	54.259	54.259	54.877	54.887
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	pengunjung	12.145	12.145	13.000	13.000
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2024



Pemerintah Kota Parepare

BAB VII

PENUTUP





BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 merupakan salah satu instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Kota Parepare. Olehnya itu, penyusunannya telah dilakukan dengan memperhatikan tahapan-tahapan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan kondisi yang dialami daerah hingga semester I tahun 2024. Dimana kondisi strategis yang dialami sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah serta antar pemerintah dengan Masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Disamping itu, perlu adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat yang dilakukan secara sistematis. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Parepare dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Parepare dan masyarakatnya dapat berkontribusi nyata dan menjadi pilar utama dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Selanjutnya, agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024, dengan terlebih



- dahulu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Seluruh Perangkat Daerah Kota Parepare berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 secara aktif dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kota Parepare pada RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026.
 3. Kepala Bappeda Kota Parepare berkewajiban untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Parepare 2024.
 4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal untuk mengetahui *progress repor* dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

7.2. Kesimpulan

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2023, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

1. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2023 telah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan, yaitu : **“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Manusia yang Berkualitas, dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”**.
3. Dengan adanya perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah



dapat lebih terarah dan lebih focus pada pencapaian kinerja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinergitas.

4. Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2024, yaitu :
 - a. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024;
 - b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2024;
 - c. Menetapkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Parepare Tahun 2024;
 - d. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2024; dan
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kota Parepare untuk mewujudkan visi dan Misi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pj. WALIKOTA PAREPARE

TTD

AKBAR ALI



dapat lebih terarah dan lebih focus pada pencapaian kinerja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinergitas.

4. Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2024, yaitu :
- a. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024;
 - b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2024;
 - c. Menetapkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Parepare Tahun 2024;
 - d. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2024;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kota Parepare untuk mewujudkan visi dan Misi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pj. WALIKOTA PAREPARE

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA